

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN



Jl. Pembangunan No. 7 Telp. 0517-31052, 31510 Fax. 0517-31052  
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111

## **KATA PENGANTAR**

Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi pemerintah perlu untuk dikembangkan media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , sedangkan Penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan . Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Maka Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2022 dengan menyajikan mengenai keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.



Kantaa : Maret 2023

Kepala

**HJ.AHLUL JANAHS.Pd,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641012 198305 2 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan .....	2
1.3 Isu Strategis .....	3
1.4 Tugas Pokok , Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	3
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	12
1.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi .....	15
1.7 Peluang Pengembangan Pelayanan Skpd.....	15
1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020 .....	15
1.9 Sistematika Laporan.....	16
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Perencanaan Strategi .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) .....	21
2.3 Perjanjian Kinerja .....	25
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>28</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
Lampiran – Lampiran :	
1. SK TIM LKIP Tahun 2022	
2. SK IKU Perubahan 2022	
3. Lampiran PK beserta Capaiannya s/d triwulan IV	
4. Lampiran IKI beserta Capaiannya s/d triwulan IV	
5. Lampiran Rencana aksi beserta Capaiannya. s/d Triwulan IV	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **A. Mekanisme Penyusunan**

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan Kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .

### **B. Mekanisme Pengukuran**

- Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin “ Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia , Sejahtera yang Tangguh dan Mandiri “ yang mempunyai makna Agar setiap keluarga dapat memperoleh kebahagiaan melalui ber – Kb dengan slogan dua anak cukup sehingga terciptanya keluarga yang kecil bahagia , yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar , baik secara rohani , jasmani maupun sosial.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 telah menetapkan 3 ( tiga ) Sasaran Strategis , selanjutnya sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 4 ( empat ) Indikator Kinerja utama

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kab. Tapin dalam program capaian program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja kegiatan dimaksud terdapat dalam tabel berikut:

Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Renstra realisasi  
Per 31 Desember 2022

No	Sasaran Strategis dalam Renstra	Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022
1	Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan kesertaan ber-KB ( CPR)	83,25	74,87
2		Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need)	9,76	13,88
3	Terkendalinya angka kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari pasangan Usia Subur	2,15	1,96
4	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80	79,60

Sasaran Program dan Capaian Indikator kinerja dalam Renstra realisasi Per 31 Desember Tahun 2022 :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Kelahiran Total ( TFR ) per WUS ( 15 -49 ) tahun	2,08%	1,96%
		Persentase peserta KB aktif MKJP	14,50%	6,44%
2	Meningkatnya Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga ( UPPKS,BKB, BKL , BKL dan Pik R)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan konseling remaja ( PIK –R ) yang aktif	79,52%	10,64%
		Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,56%	78,79%
		Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,11%	80%
		Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	84,02%	100%
		Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,14%	72,37%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
3	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase Data yang dimanfaatkan dalam program kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga	75%	100%
4	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	45%	68%

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp. 10.761.417.088,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 9.384.924.098,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 87,21%.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, sesuai PERDA Kab. Tapin No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas tersendiri dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II, III, dan IV ) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja Instansi, maka dibuatlah LKIP Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin, sehingga LKIP ini dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) Tahun 2020– 2024 menyebutkan bahwa program KB merupakan rangkaian pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya mengendalikan kualitas penduduk melalui terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.

Sejalan dengan amanat reformasi dengan semangat desentralisasi otonomi Daerah diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat membantu dan mempercepat pembangunan lainnya, diberbagai sektor terkait walaupun dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, sistimatis dan berkoordinasi sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada.

Namun demikian perlu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam kerangka jalinan sinkronisasi dan koordinasi yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga suksesnya pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dapat memberikan kontribusi untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Tapin.

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan dan isu- isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah , Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kab/kota . dalam undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 ( empat ) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu : 1) pengendalian Penduduk, 2) keluarga berencana, 3) keluarga sejahtera dan 4) Standarisasi dan Sertifikasi.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di kab/kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada Masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keterpilihan ketersediaan infrastuktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan tenaga penyuluh dan pelayanan KB. Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB sebagai mana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020, Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 mengenai kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

## **1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

### **1. Masih Kurangnya Kesertaan ber-KB**

- a. Kurangnya Pengetahuan tentang pentingnya kontrasepsi
  - Kurangnya Pembinaan/sosialisasi tentang kontrasepsi
- b. Kurangnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Program bangga Kencana kepada pasangan usia subur.
  - Kurangnya Tenaga PKB/PLKB sehingga Program Bangga Kencana tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat
- c. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrsepsi Jangka Panjang
  - Masih adanya stigma negatif mengenai Pemakaian MKJP di masyarakat

- Masih adanya rasa takut dan Stigma untuk menggunakan Alat Obat kontrasepsi (Implan IUD)
2. Masih Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga
    - a. Kurangnya KIE kepada masyarakat khususnya kelompok kegiatan (POKTAN)
      - Kurangnya Pembinaan kepada Poktan
      - Belum maksimalnya semua anggota aktif dalam kelompok kegiatan
      - Minimnya insentif kader dan sebagian kader Poktan belum mendapatkan insentif

### **1.3. ISU STRATEGIS**

Pada bagian ini akan disampaikan isu – isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang menjadi focus di tahun 2022 , yaitu sebagai berikut :

- a. Masih adanya keluarga Pra Sejahtera ( PS ) dan Keluarga Sejahtera 1 ( KS 1)
- b. Masih kurangnya Pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber –KB
- c. Masyarakat masih kurang memahami manfaat/fungsi dari kelompok kegiatan BKB, BKL, dan BKR.
- d. Peran serta Remaja dalam Pusat Informasi dan konseling Remaja ( PIK –R ) belum optimal
- e. Masih Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga
- f. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga serta pengetahuan mengenai reproduksi masih rendah.

### **1.4. TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan PERBUP Kab. Tapin No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. DPPKB merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPPKB Kabupaten Tapin, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tapin khusus dan sesuai dengan tugas pokok adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan serta peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelaksanaan Pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
4. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB, Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, Pembinaan kesertaan ber-KB, Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Pembinaan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Unit Pelaksanaan Teknis;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariat;
10. Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DPPKB Kabupaten Tapin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari:

#### **1. Kepala**

- a) Mengkoordinasikan , membina , mengawasi dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;

- b) Mengkoordinasikan , membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk , keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c) Melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan pengendalian penduduk;
- d) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan avokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana ;
- e) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana ;
- f) Mengkoordinasikan , membina dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- g) Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT:
- i) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Sekretaris**

mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian . untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas ;
- b. Penyusunan program, koordinasi , pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Penyusunan Program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat Terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran ,penatausahaan keuangan , evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas ;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana Dinas yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran ;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah , laporan keterangan peranggung jawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan , akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun Eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang dan ;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewengannya.

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian .
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat , ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan , organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat surat ekspedisi;

- d. Menyiapkan bahan , mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas , informasi jabata, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabata, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan , pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai ;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian, meliputi : besetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian , absensi dan cuti pegawai;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m. Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan standar Operasional Prosedur Dinas;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkungan Dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Bidang Pengendalian Penduduk ,Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan advokasi dan penggerakan , penyuluhan, pendayagunaan lini lapangan dan kader keluarga berencana, pengendalian penduduk dan Informasi keluarga .

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program, Koordinasi, Pembinaan, Pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/ petugas keluarga berencana;
- h. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- j. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan distribusi alat, obat, kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. Penyusun program , koordinasi, pembinaan,pengaturan, dan pengendalianpengelolaan dan sitribusi alat,obat dan kontrasepsi;
- b. Penyusunan program,koordinasi, pembinaan, pengaturan,dan pengendalian pelayanan keluarga berencana;
- c. Penyusunan program ,koordinasi,pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. Penyusunan program ,koordinasi,pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
- e. Penyusunan program ,koordinasi,pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
- f. Penyusunan program ,koordinasi,pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;
- g. Penyusunan program ,koordinasi,pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat dan kontrasepsi didaerah;
- h. Penyusunan program, koordinasi,pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana daerah;
- i. Penyusunan program, koordinasi,pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana;
- j. Penyusunan program, koordinasi,pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana;dan
- k. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keluarga berencana.

## **5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mengkoordinasikan , membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan keluarga sejahtera , bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan program , koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b) Penyusunan program , koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
- c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina ketahanan remaja;
- d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan,dan pengendalian perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan,dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- g) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- h) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- i) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
- j) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- k) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional penata kependudukan dan Keluarga Berencana Muda dalam Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berjumlah 6 ( enam ) orang , bertugas melaksanakan kegiatan penatalaksanaan , penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

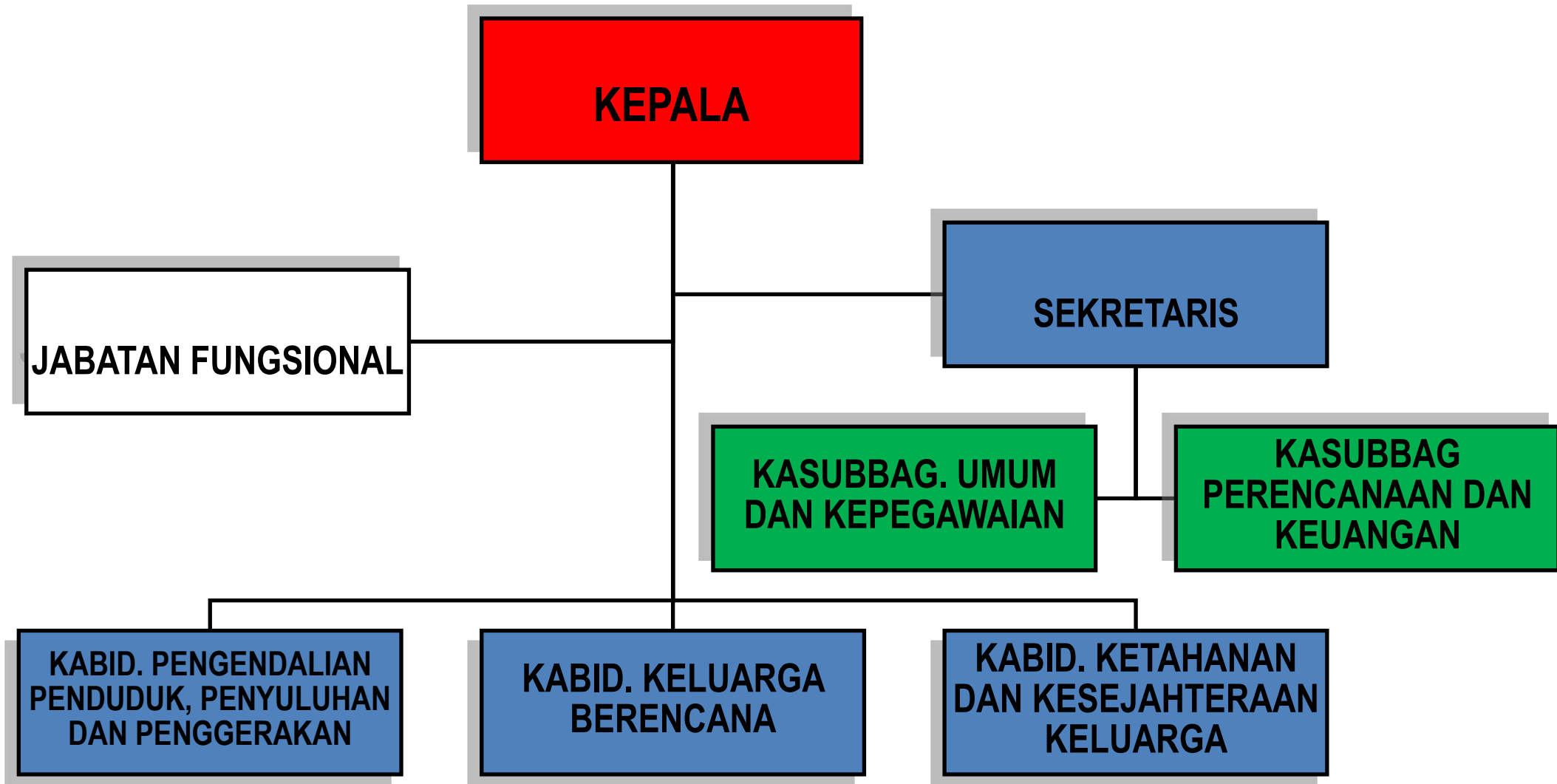
### **1.4.1. Struktur Organisasi DPPKB Kabupaten Tapin**

Gambaran pembagian tugas kepada masing-masing unsur dalam organisasi dapat digambarkan pada struktur organisasi. Struktur organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretaris dengan 2 ( dua ) Kepala sub bagian dan 3 ( tiga ) Kepala Bidang yaitu Bidang Pengendalian Penduduk , penyuluhan dan penggerakan, Bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



## 1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPPKB Kabupaten Tapin adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/pembinaan dengan instansi terkait tingkat kab dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga berencana.
2. Koordinasi/pembinaan dengan instansi terkait tingkat kab dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan keluarga berencana.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan , mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Proses penyelenggaraan pelayanan didukung oleh:

a. Sumberdaya Manusia.

1. Jumlah Pegawai

Jumlah PNS yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB per 31 Desember 2022 berjumlah 18 ( Delapan Belas ) orang , dan Kontrak / PTT berjumlah 19 ( Sembilan Belas ) orang , yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai ASN dan Kontrak

NO	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 ( satu ) orang
2	Sekretariat	5 ( lima ) orang
3	Bidang Keluarga Berencana	5 ( lima ) orang
4	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	3 ( tiga ) orang
5	Bidang pengendalian Penduduk dan KB	4 ( empat ) orang
Total ASN		18 (delapan belas ) orang
6	Tenaga Kontrak	19 ( sembilan Belas ) orang
Total ASN dan Kontrak		37 ( tiga puluh tujuh ) orang

## 2. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Kualifikasi Pendidikan ASN

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SLTP /Sederajat	0
2	SLTA / Sederajat	2 ( dua ) orang
3	Diploma 3	2 ( dua ) orang
4	Sarjana	9 ( sembilan) orang
5	Pasca Sarjana	5 ( lima) orang
<b>Jumlah</b>		<b>18 ( delapan belas) orang</b>

Tabel 1.3. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SLTP /Sederajat	1 ( satu ) orang
2	SLTA / Sederajat	5 ( lima ) orang
3	Diploma 3	4 ( empat) orang
4	Sarjana	7 ( tujuh ) orang
<b>Jumlah</b>		<b>17( tujuh belas ) orang</b>

## 3. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan ASN yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 antara lain :

Tabel 1.4 Pangkat dan Golongan

<b>No</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Utama Muda ( IV/c)	1 ( satu ) orang
2	Pembina Muda ( IV/b)	0
2	Pembina ( IV /a )	2 ( dua ) orang
3	Penata Tingkat I ( III/d)	7 ( tujuh ) orang
4	Penata ( III/c)	1 ( satu) orang
5	Penata Muda Tingkat I ( III/b)	3 ( tiga ) orang
6	Penata Muda ( III/a)	3 ( tiga ) orang
7	Pengatur TK.I ( II/d)	0
8	Pengatur Muda ( II/a)	0
9	Pengatur Muda TK.I ( II/c)	1 ( satu ) orang
<b>Total</b>		<b>18 ( delapan belas ) orang</b>

#### 4. Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 antara lain :

Tabel 1.5 Pejabat Struktural

No	Jabatan	Eselon	Nama / Nip
1	Kepala	II.b	Hj.Ahlul Janah,S.Pd,M.Si 19641012 198305 2 002
2	Sekretaris	III.a	Hj.Mastika Murni,SE,MM 19720205 199303 2 006
3	Kabid Pengendalian Penduduk , penyuluhan dan Penggerakan	III.b	Sandiyem,S.Sos.MAP 19670526 198902 2 002
4	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	III.b	Arief Hardiyanto,S.Sos 19790511 199803 1 001
5	Kabid Keluarga Berencana	III.b	Agus Ari Supriyadi,SKM 19820808 2005011 005
6	Kasubbag Umum kepegawaian	Iva	Kastalani,AMKL 19770430 200701 1 005
7	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Iva	Mayasari,SE 19820525 201001 2 023
8	Jf .Penyuluh Kesehatan masyarakat	-	Yoyok Timbul Suraryo,SKM 19700310 199403 1 008
9	Jf .Penyuluh Keluarga Berencana	-	Pathiah,SKM 19660303 199103 2 017
10	Jf .Penyuluh Kesehatan masyarakat	-	Yunita Afrina ,SST 19860208 200904 2 002
11	Jf .Penata kependudukan dan KB	-	Ir.Maria 19650512 199503 2 001
12	Jf .Penata kependudukan dan KB	-	Jumaitini 19680510 198903 1 001
13	Jf .Penyuluh Keluarga Berencana	-	RotuaTheresia Sibarani,S.Sos 19830708 201402 2 002
14	Analisis Ketahanan Keluarga	-	Eka Noor Cahyani,Amd.Ak 19850331 200501 2 003
15	Penyusun bahan Pembinaan Penyuluh KB	-	Mastuti,S.Ap 19810109 201212 2 001
16	Bendahara Pengeluaran	-	Najmi Az Zahra Balela,S.AK 19960413 202012 2 009
17	Analisis Keluarga Berencana	-	Juwita Sari,SKM 19941004 202012 2 011
18	Pelaksana	-	Saihul 19810715 201212 1005

## 1.6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, meliputi :

- 1) Masih rendahnya Pemakaian Metode MKJP, MOW dan MOP
- 2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB ,hal ini terkait dengan adat dan budaya setempat, dimana masih banyak yang berpegang pada budaya banyak anak banyak rezeki yang sudah lama dipercayai masyarakat, bahkan ada pula sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa program KB berseberangan dengan pandangan agama;
- 3) Masih cukup tingginya angka kelahiran sehingga perlu upaya optimal untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang;
- 4) Belum optimalnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang ( MOW dan MOP ) ;

## 1.7. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Tapin , meliputi :

- 1) Memperluas dan mempermudah jangkauan pelayanan Kontrasepsi dan penyebaran Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat luas serta meningkatkan koordinasi dan kegiatan operasional pelayanan;
- 2) Menggalang kemitraan dengan tokoh masyarakat dan pihak – pihak lain yang terkait dalam upaya mensosialisasikan program KB kepada masyarakat.

## 1.8. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Progres Nilai SAKIP DPPKB Tahun 2018-2021**

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	65,08	B
2	2019	71,23	BB
3	2020	80,89	A
4	2021	-	-

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Untuk Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana tidak memperoleh Hasil Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikarenakan tidak adanya Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

## **1.9. SISTEMATIKA LAPORAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan Penjelasan mengenai Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan / sasaran Strategis selama tahun 2022. Selanjutnya Capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan rencana kerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman maka penyajian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dengan sistematika Penyajian sebagai berikut :

### *Bab I* Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### *Bab II* Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### *Bab III* Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### *Bab IV* Penutup



Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) SK IKU yang ditandatangani dan distempel basah kedinasan;
- 2) SK TIM SAKIP Tahun 2022 yang ditandatangani dan distempel basah Kedinasan ;
- 3) Monev Rencana aksi ( Essl. 2.3 dan 4 serta Jf)
- 4) Monev IKI

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan yang ada di SKPD juga memberikan target ( Quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan Kinerja merupakan tekat dan janji, Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiaya dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan agar lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 -2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022.

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demi untuk bisa mendukung Visi Bupati Tapin Terpilih yang telah dirumuskan kedalam RPJMD kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 yaitu

“ *BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU , SEJAHTERA DAN AGAMIS*” dengan misi yang berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang agamis, sehat , Cerdas , berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan Pariwisata yang dimulai dari desa.

### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 ( lima) tahun mendatang , dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil –hasil serta manfaat yang akan diberikan dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal maka tujuan pembangunan jangka menengah DPPKB kab. Tapin antara lain:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Sekretariat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan
- 3) Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa

### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur , yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan , semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tapin sebagai langkah untuk mencapai tujuan , maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB
3. Terkendalinya Angka Kelahiran
4. Meningkatnya taraf hidup keluarga

### **2.1.3. Strategi dan Arah kebijakan**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPPKB**  
**Kabupaten TAPIN 2022**

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
			2	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Meningkatkan taraf hidup keluarga	1	Meningkatnya perencanaan keluarga	1	Meningkatkan Pengetahuan tentang pentingnya kontrasepsi	1	Meningkatnya Pembinaan/sosialisasi tentang kontrasepsi
			2	Meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Program bangga Kencana kepada pasangan usia subur	1	Meningkatkan pelatihan dan jumlah PKB/PLKB sehingga Program Bangga Kencana tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat
			3	Meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	1	Menurunkan stigma negatif mengenai Pemakaian MKJP di masyarakat
			4	Meningkatkan KIE kepada masyarakat khususnya kelompok kegiatan (POKTAN)	1	Meningkatkan Pembinaan kepada kelompok kegiatan ( Poktan )

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui

keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi, jika ditemukan permasalahan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :**

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Meningkatkan Kesertaan ber –KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber –KB ( CPR )
		Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber –KB tidak terpenuhi ( Unmet Need )
2	Terkendalnya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari pasangan usia subur
3	Meningkatnya Taraf Hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera

Uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Tapin beserta penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 .3

## Uraian Indikator Kinerja Utama beserta penjelasannya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
Meningkatnya kesertaan ber-Kb	Persentase Peningkatan Kesertaan ber –KB (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi, alasan : Mengetahui capaian penggunaan alat kontrsepsi KB
	Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmet Need )	$\frac{\text{Jumlah PUS IAT} + \text{TIAL}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena alasan ingin punya anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, alasan : Mengurangi PUS yang tidak ber-KB
Terkendalnya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah anak dari Pasangan Usia Subur	$\frac{\text{Jumlah Anak PUS}}{\text{Jumlah PUS}} \times 1000$	Jumlah anak yang dimiliki dalam pasangan usia subur . alasan : untuk mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga
Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Kaluarga Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah keseluruhan Keluarga}} \times 100 \%$	Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
			<p>yang sah menurut dimensi ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian yang mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak , bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa , memiliki hubungan yang serasi ,selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.</p>



### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung capaian rencana strategis 2022, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana membuat perjanjian kinerja dari Esselon II, III dan IV , untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja , yang perjanjian kinerja ini di buat dengan tujuan :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur,
- b) Wujud nyata komitmen,
- c) Dasar evaluasi kinerja aparatur,
- d) Dasar melakukan monitoring dan Evaluasi
- e) Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan Program, kegiatan , Sub Kegiatan dan sasaran di tahun 2022 yang menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk mewujudkan kinerja Outcome dan Output yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Di mana Indikator Kinerja Utama sudah tertuang dalam Renstra Tahun 2018 -2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Esselon II , III dan IV pada tahun 2022 dengan Indikator Kinerja dan target pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja Utama (Esselon II) dan Target Tahun 2022</b>				
<b>A</b>	<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
	1.	Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase peningkatan kesertaan ber-KB ( CPR )	83,25
			Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin berKB tidak terpenuhi ( Unmet Need )	9,76
	2	Terkendalinya angka kelahiran	Rasio Jumlah anak dari pasangan usia subur	2,15
	3	Meningkatnya taraf hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80

<b>Indikator Kinerja (Esselon III) dan Target Tahun 2022</b>				
<b>B</b>	<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>Bidang Keluarga Berencana</b>				
	1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase peserta KB aktif MKJP	14,50%
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total ( TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) (Rata-rata Anak per Wamita)	2,08
<b>Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</b>				
	2	Meningkatnya kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	45%
	3	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%
<b>Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				
	6	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembinaan keluarga ( UPPKS, BKL ,BKB dan BKR )	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling Remaja ( PIK – R ) yang aktif	68,02%
			Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga Remaja	92,36%
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,61%
			Persentase keluarga ber –KB yang aktif dalam BKB	83,98%
			Persentase keluarga ber –KB yang aktif UPPKS	92,09%
<b>Indikator Kinerja Sub Koordinator dan Target Tahun 2022</b>				
<b>C</b>	<b>No</b>	<b>Sasaran kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>Subkoordinator Bidang Keluarga Berencana</b>				
	1	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah alat kontrasepsi yang terpasang ( Aks)	978 aks
			Jumlah MOP/MOW yang dilaksanakan	4 aks
	2	Terbinanya peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%

3	Ketersediaan alat kontrasepsi di setiap lini	Persentase alat kontrasepsi yang tersedia	65%
		Persentase Alokon yang didistribusikan tepat waktu	85%
<b>Sukoordinator Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</b>			
4	Terlaksananya pembinaan Lini Lapangan , kader KB dan Sekolah	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK ( org)	25org
		Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2 sekolah
		Jumlah kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK ( kader )	185 kader
5	Ketersediaan data KKBPK	Jumlah data basis KKBPK yang tersedia ( bh )	60 bh
		Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK (org)	36 org
6	Partisipasi Mitra Kerja / lintas sektor dalam pembinaan kampung KB	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%
<b>Sub koordionator Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			
7	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan ( BKR dan PIK –R )	Jumlah Lomba Poktan PIK Remaja, kelompok dan kader BKR	24 kel.
		Jumlah PIK Remaja jalur pendidikan ( kel.)	15 kel.
		Jumlah PIK Remaja jalur masyarakat ( Kel.)	25 kel.
8	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan ( BKB dan BKL )	Jumlah BKB dan BKL yang terbina ( Kel.)	152 kel.
		Jumlah BKB,BKL yang mengikuti Lomba ( Kel.)	24 kel.
9	Terlaksananya pembinaan kelompok kegiatan UPPKS	Jumlah Uppks yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( PPKS ) ( Kel.)	25 kel.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2022, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

#### **KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

<i>No</i>	<i>Rentang Capaian</i>	<i>Katagori Capaian</i>
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2022 mengacu pada Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

#### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara garis besar penetapan Perjanjian kinerja tahun 2022 meliputi 3 (tiga) Sasaran strategis, dan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama yang tersaji sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

<i>Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target Tahun 2022</i>	<i>Realisasi Tahun 2022</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	83,25%	74,87%
	Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmet Need )	9,76%	13,88%
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,15	1,96
Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80%	79,60%

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kab.Tapin.

Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat ) indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB ( CPR ) adalah Pasangan Usia subur yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi KB sebesar 23.461 terdiri dari Suntik 13.053 Pil 8.745 Kondom 79 Implant 1.076 IUD 190 Vasektomi 14 Tubektomi 232 Mal 16 sesuai dengan Laporan New Siga Per 31 Desember 2022 dengan cara perhitungan Jumlah Peserta KB aktif (23.405) di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur ( 31.262)\* 100= 74,87%.

2. Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmet Need) Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi ( unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran sebelumnya, atau suatu kondisi yang mengisyaratkan ke inginan pasangan usia subur ( PUS ) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia , sehingga mengambil keputusan tidak menggunakan alat kontrasepsi KB. Dengan rincian sesuai dengan laporan New Siga di tingkat kabupaten , IAT sebesar 1.962 dan TIAL sebesar 2.376 Dengan perhitungan jumlah PUS IAT+TIAL ( 4.338) / Jumlah PUS ( 31.262) \* 100 = 13,88 %. Yang dimaksud dengan IAT adalah pasangan usia subur yang ingin anak di tunda sedangkan TIAL adalah Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Dari perbandingan tahun- tahun sebelumnya untuk Tahun 2022 Unmeet Need Mengalami kenaikan yang disebabkan adanya perubahan aplikasi dari Statistik Rutin menjadi New Siga sehingga kemungkinan data yang di input belum sepenuhnya diinput oleh PKB/PLKB yang ada di setiap kecamatan dan juga aplikasi yang terbaru menggunakan data BNBA.
3. Rasio Jumlah anak dari pasangan usia subur Menunjukkan perbandingan jumlah anak usia pasangan usia subur dengan Jumlah pasangan usia subur per kelompok umur di bagi 1000 . dengan perhitungan jumlah anak pasangan usia subur ( 15-39 ) di kali dengan Jumlah anak perkelompok umur dibagi 1000 . dengan Jumlah anak 5\* 391 / 1000 = 1,96.
4. Persentase Keluarga Sejahtera yang dibentuk melalui 3( tiga ) dimensi ( i Bangga ) yang merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui Dimensi ketentraman , Dimensi kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga . i Bangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. dengan perhitungan jumlah keluarga sejahtera dibagi Jumlah keseluruhan keluarga \* 100 . dengan jumlah keluarga sejahtera sebesar 44.548,70 / jumlah keseluruhan keluarga sebesar 55.973 \* 100 % = 79,60 %.

Pencapaian dalam program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan data New Siga pelayanan *peserta* KB Baru menurut metode kontrasepsi sebesar 1.123 dan Jumlah Peserta KB aktif sebesar 23.405 .

**Tabel 3.2**

**Capaian atas Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tapin per 31 Desember 2022**

<i>Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi tahun 2022</i>	<i>Capaian Thn 2022 ( % )</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB ( CPR )	83,25%	74,87%	89,93%
	Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber - KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,76%	13,88%	70,32%
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,15	1,96	109,69%
Meningkatnya Taraf Hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80%	79,60%	99,5%

Untuk Capaian Kinerja atas perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

## Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpebuhi (Unmeed Need)	9,76	13,88	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 454.631.000	Bidang Keluarga Berencana
	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)	83,25	74,87			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 40.763.100	



Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp 37.850.000	
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp 2.913.100	
				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Rp 17.640.000</b>	
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp 17.640.000	
				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 320.811.400</b>	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 30.000.000	
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 82.807.900	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp 71.600.200	
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 30.085.700	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 106.317.600	
				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Rp 75.416.500</b>	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 36.726.600	
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp 38.689.900	
<b>Meningkatnya Taraf Hidup keluarga</b>	<b>Persentase Keluarga Sejahtera</b>	<b>80</b>	<b>79,60</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Rp 720.450.300</b>	<b>Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>
				<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Rp 683.561.500</b>	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp 76.939.000	
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 119.993.100	
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 344.571.600	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 100.510.900	
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rp 13.300.000	
				Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Rp 28.246.900	
				<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Rp 36.888.800</b>	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 21.387.800	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 8.022.900	
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rp 7.478.100	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,15	1,96	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 214.124.600	Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 89.719.200	
				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Rp 70.374.700	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp 14.490.600	

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Realisasi Target IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			TW IV			
1	2	3	4	5	6	7
				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Rp 4.853.900	
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 124.405.400</b>	
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100	
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200	
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.582.000	
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200	



### **3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018**

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja yang telah Ditetapkan dalam dokument Rencana Strategi ( Rensta) Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018 - 2023 . berikut tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2022,2021, 2020 , 2019 dan 2018 :

Tabel 3.4

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Kinerja														
			2018			2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB ( CPR )	82,88	82,98	100,12	82,9	82,23	99,19	83,16	84,12	101,15	83,2	85,21	102,42	83,25	74,87	89,93
		Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmet Need )	9,92	9,11	108,89	9,88	8,93	110,64	9,84	8,01	122,85	9,82	7,22	136,01	9,76	13,88	70,32
2	Terkendalnya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,2	2,19	100,46	2,18	2,16	100,93	2,17	2,25	96,44	2,16	1,7	127,06	2,15	1,96	109,69
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga ( KKBPK )	Persentase Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK	65	70	107,69	72	71,11	98,76	75	77,44	103,25						
		Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan										77	99,8	129,61			

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Kinerja															
			2018			2019			2020			2021			2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Meningkatnya Taraf hidup keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera														80	79,60	99,5

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator kinerja Persentase peningkatan kesertaan ber-KB ( CPR ) per 31 Desember 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun –tahun sebelumnya dimana realisasi CPR tahun 2022 sebesar 74,87 % dengan capaian 89,93% dengan jumlah pasangan usia subur ( 31.262) dengan peserta KB aktif sebesar 23.477 karena disebabkan penggunaan aplikasi baru New Siga yang menggunakan data BNBA dan juga masih ada data yang belum di input kedalam aplikasi new siga oleh Plkb/Pkb. sedangkan per tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 98,65 % dari tahun 2020 karena perbandingan Pasangan Usia Subur ( PUS ) dari tahun 2018 berjumlah 37.868 dan tahun 2019 berjumlah 40.664 dan tahun 2020 sebesar 40.536 dan tahun 2021 sebesar 42.122 dengan peserta KB aktif tahun 2018 sebesar 31.550, tahun 2019 sebesar 33.437 dan tahun 2020 sebesar 34.09 dan tahun 2021 sebesar 35.893.

Indikator persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmet need) mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan realisasi 13,88% dengan jumlah IAT sebesar 1.962 dan TIAL sebesar 2.376 dikarenakan penggunaan aplikasi baru New Siga yang menggunakan data BNBA dan juga masih adanya data yang tidak terinput kedalam aplikasi tersebut . dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Unmeet Need mengalami penurunan, yang berarti bahwa wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali banyak yang sudah terlayani atau menggunakan kontrasepsi KB di mana dari tahun 2018 sebesar 9,10 dengan IAT sebesar 1.876 dan TIAL sebesar 1.817 dan tahun 2019 sebesar 8,93 , dengan jumlah IAT 2.025 dan TIAL 1.698 dan tahun 2020 sebesar 8,01 dengan Jumlah IAT 1.778 dan TIAL sebesar 1.469 dengan keterangan **IAT** (ingin anak tunda) dan **TIAL** (tidak ingin anak lagi) dan tahun 2021 untuk IAT sebesar 1.674 dan TIAL Sebesar 1.366.

Sedangkan Untuk indikator rasio Anak dari pasangan usia subur pada tahun 2022 dengan realisasi capaian sebesar 109,69 dari target 2,15 terealisasi 1,96 dibandingkan capaian dari tahun –tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami penurunan yang berarti bahwa setiap keluarga memiliki anak rata –rata sekitar 2 orang. Sedangkan untuk indikator persentase keluarga sejahtera pada tahun 2022 dengan capaian 99,5% dari target 80 % dan Realisasi 79,60 %, Dimana keluarga sejahtera yang dibentuk melalui 3 ( tiga ) dimensi antara lain dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.

### 3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Esselon III beserta Jabatan Fungsional

Capaian Kinerja (Esselon III )						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya	Persentase peserta	14,50%	6,44%	44,41%

		Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	KB aktif MKJP			
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total ( TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) (Rata-rata Anak per Wamita)	2,08	1,96	130%
<b>Capaian Kinerja Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat, Kontrasepsi )</b>						
	2	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Ketersediaan Alat obat kontrasepsi ( Alokon ) disetiap lini	Persentase alat obat kontrasepsi ( Alokon) yang tersedia	65%	24,37%	37,49 %
			Persentase alat , obat dan kontrasepsi ( Alokon) yang didistribusikan ke sasaran tepat waktu	85%	75,63%	88,97%
<b>Capaian Kinerja Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana)</b>						
	3	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang ( aks)	978 Aks	549 Aks	56,13%
			Jumlah MOP/MOW yang dilaksanakan	4 Aks	4 Aks	100%
<b>Capaian Kinerja Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pembinaan Kesertaan KB)</b>						
	4	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Terbinanya Peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	89%	104,7 %

**1. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Capaian Kinerja (Esselon III )						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	45%	68%	151,11%
	2	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	100%	125%
Capaian Kinerja Jabatan Fungsional ( Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan )						
	No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Partisipasi Mitra Kerja /Lintas Sektor dalam Pembinaan Kampung KB	Persentase Mitra Kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	75%	107,14 %
Capaian Kinerja Jabatan Fungsional ( Subkoordinator Penyuluhan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB )						
	No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	,Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan Lini lapangan , kader KB dan sekolah	Jumlah petugas lini Lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK( org)	25	25	100%
			Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2	12	600%
			Jumah kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	185	240	129,72%
Capaian Kinerja Jabatan Fungsional						

( Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga )						
No	Sasaran Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketersediaan Data KKBPK		Jumlah data basis KKBPK yang tersedia ( bh)	60	60	100 %
			Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK ( bh)	36	71	197,33%

## 2. Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Capaian Kinerja (Esselon III )						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembinaan keluarga ( UPPKS, BKB, BKL, BKR )	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	79,52 %	10,64%	13,38%
			Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,56 %	78,79%	85,12%
			Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,14 %	72,37%	78,54%
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	84,02 %	100%	119,02%
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	73,11 %	80%	109,42%
Capaian Kinerja Jabatan Fungsional ( Subkoordinator Pemberdayaan keluarga sejahtera )						
	2	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan UPPKS	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( PPKS/Kel)	25	0	0

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional ( Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia )						
	3	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok kegiatan ( BKB dan BKL )	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152	130	85,52%
			Jumlah BKB dan BKL yang mengikuti lomba	24	24	100%
Capaian Kinerja Jabatan Fungsional ( Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja)						
	4	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan( BKB dan PIK R )	Jumlah lomba poktan PIK remaja , kelompok dan kader BKR	24	24	100 %
			Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (Kel.)	15	11	73,33%
			Jumlah PIK Remaja jamlur Masyarakat ( Kel. )	25	21	84%

Capaian untuk Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB selama Lima Tahun dari Tahun 2018 – 2022 dan juga merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja ( PK ) oleh Esselon III, dan Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB semuanya tidak luput dari kerjasama dan Kinerja semua pegawai dan Mitra kerja. Dimana Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan pelayanan kontrasepsi ( Pelkon ) yang berkerjasama dengan klinik KB Pemerintah, Klinik KB swasta , Dokter maupun bidan Praktek Swasta berupa pelayanan kontrasepsi yang meliputi pelayanan peserta Kb baru ( seluruh Keluarga maupun pelayanan bagi keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1) yang meliputi kegiatan pemberian kontrasepsi ulang , pencabutan dan pemasangan ulang IUD dan Implant. Laporan fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinas Pengendalian penduduk dan KB sebanyak 13 puskesmas dan 3 klinik bidan mandiri dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dan RSUD Handayati.



Hasil Pelayanan Kontrasepsi dengan pemberian Informed Consent ( penyampaian Informasi dari dokter , Maupun Tenaga medis lainnya , kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan ) dengan jumlah pemberian Informed Consent dan peserta KB Baru dan jumlah pemberian peserta KB ulangan yang diberikan Informed Consent di 12 kecamatan menurut Metode Kontrasepsi sebanyak 514 peserta KB Baru , suntikan 374, Implant 130 , IUD 5 , Tubektomi 5, dan peserta KB ulangan sebanyak 732 , terdiri dari suntikan 596, Implant 125, Iud 8, Tubektomi 2, dan Vasektomi 1.

Pelayanan Pasca Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Untuk Pasca Persalinan sebanyak 540 , terdiri dari suntikan 445 peserta, Pil 56 Peserta , Kondom 2 peserta, Implant 129 Peserta , IUD 4 Peserta , dan Tubektomi 4 peserta . Pembantu Pembina keluarga berencana Desa ( PPKBD ) yang bertugas untuk membantu pekerjaan PKB/PLKB yang ada di kabupaten Tapin sebanyak 135 orang dengan tugas membantu tersebarnya informasi KB ke masyarakat dan membantu dalam menciptakan pembangunan keluarga sejahtera dan membantu desa khususnya dalam mendukung program KKBPK.

Dengan Jumlah Poktan yang dibina sebanyak 321 kelompok kegiatan , terdiri dari poktan Bina Keluarga Balita berjumlah 132 Kelompok , Poktan Bina Keluarga Lansia sebanyak 63 kelompok, Poktan Bina Keluarga Remaja sebanyak 37 kelompok, PIK-R sebanyak 52 kelompok dan UPPKA sebanyak 36 kelompok.

Jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) sebesar 31.335 dan Peserta KB aktif sebesar 23.477 pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 menggunakan aplikasi baru yaitu New Siga yang menggunakan data berdasarkan by name by address ( BNBA) sedangkan tahun sebelumnya menggunakan aplikasi Statistik Rutin tidak menggunakan BNBA , yang mana aplikasi keduanya berasal dari BKKBN dan Unmeet juga juga mengalami kenaikan dari tahun- tahun sebelumnya dikarenakan aplikasi yang digunakan berbeda dari tahun sebelumnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki Kampung KB ( Keluarga Berkualitas) yang ada di Kabupaten Tapin Sebanyak 24 kampung KB yang ada di setiap kecamatan yang mana di setiap kampung Kb di haruskan mempunyai rumah dataku yang berfungsi sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan ditingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari masyarakat. Untuk Rumah dataku yang sudah ada sekitar 17 buah , masih ada 7 yang belum mempunyai rumah dataku dikarenakan kampung KB tersebut belum membuat user name sebagai syarat pembuatan rumah dataku. Dari 17 rumah dataku ada 3 ( tiga ) rumah dataku yang masuk kategori Paripurna yaitu desa hiyung, Bitahan Baru dan Harapan masa, dan ada 14 ( empat belas) rumah dataku yang masuk kategori sederhana.

### 3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan capaian kinerja antara tahun ini dengan target jangka menengah di renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah**

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	2022	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	83,30 %	83,25%	74,87%
		Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmet Need )	9,70%	9,76%	13,88%
2	Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,14 Anak	2,15 Anak	1,96 Anak
3	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80%	79,60%	99,5 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk mencapai target akhir yang sesuai dengan Rencana strategi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan sesuai dengan realisasi capaian pada indikator kinerja pada tahun 2018 , 2019 , 2020 dan 2021 maka target tersebut akan dapat di realisasikan pada akhir tahun renstra . untuk Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB ( CPR )dari tahun 2018, 2019 ,2020 dan 2021 sudah melebihi target yang ada pada Renstra . sedangkan untuk tahun 2022 Untuk persentase peningkatan kesertaan ber-KB ( CPR ) belum dapat mencapai target akhir pada renstra dikarenakan adanya perubahan aplikasi yang digunakan dari tahun sebelumnya menggunakan Statistik Rutin dan pada tahun 2022 menggunakan New Siga yang mana data yang digunakan bersumber BNBA .

Indikator persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( unmet Need) dari tahun 2018 , 2019 2020 dan 2021 sudah melebihi target yang ada pada

Renstra karena Jumlah pasangan usia subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( unmet need) mengalami penurunan, yang berarti pasangan usia subur ( PUS ) banyak yang menggunakan alat , obat kontrasepsi KB, sedangkan pada tahun 2022 Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun –tahun sebelumnya sehingga capaian untuk akhir pada renstra belum tercapai dikarenakan adanya perubahan aplikasi yang digunakan dari tahun sebelumnya menggunakan Statistik Rutin dan pada tahun 2022 menggunakan New Siga yang mana data yang digunakan bersumber BNBA

Sedangkan Untuk Indikator rasio Anak dari pasangan usia subur pada tahun 2022 dengan target akhir pada renstra sudah melebihi dari target yang ada sebesar 1.96 dari target 2,14 anak . Sedangkan untuk indikator persentase kelompok binaan KKBPK yang menindaklanjuti hasil kegiatan pada tahun 2021 dengan capaian 129,61 dari target 77 % dan Realisasi 99,8 %. Hampir mencapai target akhir pada Rensta sebesar 85 %. Dan untuk Indikator Persentase Keluarga Sejahtera hanya ada di Tahun 2022 dikarenakan adanya LHE Tahun 2021 dari Kemenpan RB No. B/1164/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 untuk mengganti Indikator Persentase kelompok binaan KKBPK yang menindaklanjuti hasil dikegiatan Yang belum berorientasi pada outcome . dengan capaian Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2022 sebesar 99,5 % Dari target 80% dengan realisasi 79,60 %.

#### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dari hasil pengukuran indikator kinerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2022 hasil capaian 3 (tiga) kinerja utama dengan 4 ( empat ) Indikator kinerja utama yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB , yang memenuhi target hanya ada 3 ( tiga ) indikator kinerja utama yang telah memenuhi target yang diharapkan , sedangkan 1 ( satu ) indikator kinerja utama yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang tidak ingin ber-KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need) dengan target 9,76 % realisasi 13,88 % . dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dan juga adanya perubahan aplikasi dari tahun sebelumnya yang menggunakan Statistik Rutin ( SR ) yang belum menggunakan BNBA sedangkan tahun 2022 menggunakan aplikasi New Siga berdasarkan BNBA sehingga kemungkinan masih ada data-data yang belum di input ke aplikasi oleh PKB/PLKB dan kemungkinan adanya input data ganda.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang sesuai dengan target yang diharapkan antara lain Persentase peningkatan kesertaan ber KB ( CPR ) , Rasio Jumlah anak dari pasangan usia subur dan Persentase Keluarga Sejahtera. Yang merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- a) Target Persentase peningkatan kesertaan ber-KB ( CPR ) tahun 2022 sampai tercapai 74,87 % ,antara lain karena :
- Pencanangan kampung KB pada 24 desa yang secara tidak langsung memberikan peningkatan dalam program KKBPK di wilayah kampung KB yang ada di kabupaten Tapin.
  - Adanya kelompok kegiatan ( Poktan ) BKB, BKL , BKR dan UPPKS
  - Adanya kerjasama antara PKK , TNI Kb Kes dan mitra kerja lainnya dalam program KKBPK
  - Pembinaan mengenai KB MKJP di daerah terpencil
  - Dibentunya Rumah dataku pada setiap kampung KB yang ada di kecamatan di kabupaten Tapin
- b) Target persentase pasangan usia subur ( PUS ) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( unmet need) tahun 2022 sebesar 13,88% antara lain karena :
- Distribusi alat, obat dan kontrasepsi KB tepat waktu di setiap faskes dan desa sehingga memudahkan pasangan usia subur untuk ber-KB
  - Adanya bhakti sosial pelayanan keluarga berencana yang mana kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk mengikuti program KB seperti pemasangan Implant dan IUD secara gratis
  - Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi KB
  - Adanya kegiatan bhakti sosial PKK dan TNI dalam Program KKBPK
- c) Target persentase masyarakat desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK tahun 2022 sebesar 78,69 % , dan dari kinerja sudah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
- Adanya kelompok kegiatan ( Poktan ) BKB , BKL , BKR dan UPPKS dalam program KKBPK
  - Pembinaan Kampung KB di 24 desa se kab. Tapin
  - Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di setiap desa
- Solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan upaya-upaya antara lain :
1. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan bagi Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB/PLKB ) dengan mengikuti sosialisasi maupun pelatihan terkait dengan pelaksanaan kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan .

2. Mengusulkan penambahan pegawai baru karena setiap bidang tidak ada memiliki staf sehingga pekerjaan jadi sedikit terhambat .dan juga pengusulan untuk penyuluh KB ke BKKBN Provinsi karena untuk penyuluh KB di kabupaten Tapin masih sangat kurang, dimana pada tahun 2022 jumlah penyuluh KB hanya berjumlah 28 orang, sedangkan desa yang harus dilayani berjumlah 131desa.
3. Melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat serta dengan melakukan sosialisasi mengenai pelayanan – pelayanan untuk MKJP ke daerah – daerah terpencil.
4. Meningkatkan kerjasama dengan sector- sector terkait seperti KUA, Departemen Agama , TNI, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah sakit , Ikatan Bidan Indonesia mengenai program-program yang dilaksanakan BKKBN.

### 3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Selama Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kab. Tapin melakukan berbagai Upaya efisiensi antara lain :

- a. Sumberdaya Manusia (SDM)

**Table 3.6**  
**Jumlah Pegawai ASN dan NON ASN**

NO	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 ( satu ) orang
2	Sekretariat	5 ( lima ) orang
3	Bidang Keluarga Berencana	5 ( lima ) orang
4	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	3 ( tiga ) orang
5	Bidang pengendalian Penduduk dan KB	4 ( empat ) orang
Total ASN		18 (delapan belas ) orang
6	Tenaga Kontrak	19 ( sembilan Belas ) orang
Total ASN dan Kontrak		37 ( tiga puluh tujuh ) orang

Sumberdaya manusia yang digunakan dengan melihat dari tabel diatas masih sangat kekurangan pegawai yang ada diDinas pengendalian penduduk dan kb terutama staf dan juga untuk penyuluh Keluarga Berencana masih sangat jauh kekurangan pegawai karena setiap kecamatan hanya ada 1 atau 2 penyuluh keluarga berencana .sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih belum bisa dikerjakan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap capaian penyerapan anggaran.

Upaya – upaya efisiensi yang digunakan antara lain dengan mengangkat tenaga kontrak sebagai pengganti Staf sehingga mereka bisa membantu untuk memaksimalkan pekerjaan – pekerjaan dan juga membantu dalam penggunaan aplikasi berbasis web guna menunjang peningkatan kinerja.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel 3.7**  
**Sarana dan Prasarana DPPKB**

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG		JUMLAH
		B	RB	
1	P.C Unit	11	-	11
2	Note Book	12	-	12
3	Personal Komputer lainnya	4	-	4
4	Monitor	2	-	2
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	-	16
6	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	-	2
7	alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya lainnya (dst)	48	-	48
8	Station Wagon	1	-	1
9	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	1	-	1
10	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	3	-	3
11	Sepeda Motor	43	-	43
12	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2	-	2
13	Scanner (Universal Tester)	1	-	1
14	Lemari Penyimpan	16	-	16
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	-	3
16	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	-	2
17	Lemari Besi/Metal	1	-	1
18	Lemari Kayu	13	-	13
19	Rak Besi	1	-	1
20	Rak Kayu	3	-	3
21	Filing Cabinet Besi	2	-	2
22	Lemari Kaca	3	-	3
23	Overhead Projector	1	-	1
24	LCD Projector/Infocus	2	-	2
25	Papan Tulis	1	-	1

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG		JUMLAH
		B	RB	
26	Alat Kantor Lainnya	1	-	1
27	Meja Rapat	1	-	1
28	Kursi Tamu	2	-	2
29	Kursi Putar	4	-	4
30	Kursi Lipat	54	-	54
31	Alat Pembersih lainnya	1	-	1
32	Lemari Es	1	-	1
33	A.C. Window	5	-	5
34	A.C. Split	3	3	6
35	Televisi	2	1	3
36	Sound System	4	-	4
37	Handy Cam	3	-	3
38	Bracket Standing Peralatan	1	-	1
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	41	-	41
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	-	5
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13	-	13
44	Meja Rapat Pejabat Eselon III	6	-	6
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	-	4
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	-	7
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	3	-	3
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	-	2
49	Lemari Arsip Pejabat lainnya	6	-	6
50	Audio Amplifier	1	-	1
51	Microphone/Wireless MIC	1	-	1
52	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2	4
53	Photo Tustel	1	-	1
54	Layar Film/Projector	1	-	1

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG		JUMLAH
		B	RB	
55	Telephone Mobile	24	3	27
56	Alat Kedokteran umum lainnya	18	-	18
57	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	4	-	4
58	Exhaust Fan	3	-	3
<b>TOTAL</b>		<b>420</b>	<b>9</b>	<b>429</b>

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan terserap sebesar Rp. 9.384.924.098,- atau sebesar 87,21%, dapat dilihat seperti table dibawah :

**Table 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran 2022**

URAIAN		ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
<b>BELANJA</b>		<b>10.761.417.088</b>	<b>9.384.924.098</b>	<b>87,21</b>
I	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.576.467.343</b>	<b>8.347.207.819</b>	<b>87,16</b>
	1 Belanja Pegawai	3.132.367.143	2.665.808.070	85,11
	2 Belanja Barang dan Jasa	6.444.100.200	5.681.399.749	88,16
II	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.184.949.745</b>	<b>1.037.716.279</b>	<b>87,57</b>
	1 Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	998.949.745	870.762.225	87,17
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.000.000	166.954.054	89,76

**3.1.6. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan /kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang pencapaian target kinerja pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang termuat dalam Revisi Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan KB yaitu Program Pembinaan keluarga berencana ( KB ) dengan sasaran kegiatan a) Meningkatnya partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB dengan indikator kinerja Persentase Peserta KB Aktif MKJP dengan target 14,50% dan terealisasi 6,44 %, dikarenakan masih kurangnya peminat dalam penggunaan KB MKJP dan juga adanya penggantian penggunaan metode kontrasepsi dari MKJP ke Metode Kontrasepsi jangka pendek seperti Suntik dan PIL dan b). Menurunnya Angka kelahiran Total dengan Indikator kinerja Angka kelahiran Total TFR per WUS ( 15-49 tahun ) rata-rata anak perwanita dengan target 2,08 dan terealisasi 1,96. dengan kegiatan yang mendukung seperti Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (



PKB/PLKB ) , Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ kota dan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Program kedua yang mendukung pencapaian target kinerja yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan terdiri dari a) Meningkatnya kampung KB yang aktif dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja dengan target 45% dan terealisasi 68 %,b) Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB dengan indikator kinerja Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / kota

Program Ketiga yang mendukung pencapaian target kinerja yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera ( KS ) dengan sasaran kegiatan Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembinaan keluarga ( UPPKS, BKB,BKL, BKR ) dengan indikator Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja ( PIK –R ) yang aktif dengan target 79,52 % terealisasi 10,64% , Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga remaja dengan target 92,56% terealisasi 78,79% , persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS dengan target 92,14 % terealisasi 72,37 % , Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB dengan target 84,02 % terealisasi 100 % , Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL dengan target 73,11% terealisasi 80%, dengan dukungan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan , yang mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan SAP ( Standard Akuntansi Pemerintah ) Pagu Anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 9.384.924.098,- atau 87,21%. Dengan rincian sebagai berikut :

**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN  
ANGGARAN 2022**

<b>Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.133.806.588	4.636.068.401	90,30
2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.143	2.667.788.070	85,13
2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.047.143	2.662.888.070	85,10
2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	100
2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000	2.450.000	100
2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.328.378.900	1.323.339.089	99,62
2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.161.200	4.161.200	100
2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.336.300	59.336.300	100
2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.864.700	64.819.700	99,93
2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.361.400	12.357.200	99,97
2 14 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material	4.015.300	3.995.500	99,51
2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.270.000	2.750.000	43,86
2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.177.370.000	1.175.919.189	99,88
2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.248.745	104.400.000	96,44
2 14 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.248.745	101.400.000	96,34
2 14 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.613.000	226.860.944	99,23
2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200	1.473.200	96,21
2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.897.400	70.247.744	97,71
2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.184.400	155.140.000	99,97
2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.618.800	308.680.298	93,65
2 14 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.133.800	122.261.244	98,49

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.080.000	99,61
2.14.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	181.339.054	90,50
<b>2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>336.054.600</b>	<b>314.479.233</b>	<b>93,58</b>
2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	89.719.200	79.918.300	89,08
2 14 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	70.374.700	61.502.700	87,39
2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.600	13.580.600	93,72
2 14 02 2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.900	4.835.000	99,61
2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	246.335.400	234.560.933	95,22
2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	7.363.900	96,09
2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100	56.000.100	100,00
2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	67.200.000	65.116.682	96,90
2 14 02 2.02 10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200	30.809.200	82,48
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4.330.000	4.328.800	99,97
2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	55.982.000	53.844.351	96,18
2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200	17.097.900	96,03
<b>2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>2.703.601.600</b>	<b>2.377.397.157</b>	<b>87,93</b>
2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.037.350.700	870.585.557	83,92
2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	225.597.600	154.487.600	68,48

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	23.909.000	95,64
2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	73.553.100	70.639.000	96,04
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000	142.400.000	76,07
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	486.000.000	456.074.957	93,84
2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	23.075.000	57,69
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	661.290.000	660.890.000	99,94
2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	13.290.000	13.290.000	100,00
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	648.000.000	647.600.000	99,94
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	533.524.400	459.009.400	86,03
2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41.550.000	41.475.000	99,82
2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	138.004.900	123.654.100	89,60
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	214.566.200	194.249.200	90,53
2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.085.700	26.018.500	78,64
2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.317.600	73.612.600	69,24
2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	471.436.500	386.912.200	82,07
2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.726.600	29.129.400	79,31
2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	434.709.900	357.782.800	82,30

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.587.954.300	2.056.979.307	79,48
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.523.810.500	2.002.835.807	79,36
2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	76.939.000	76.259.900	99,12
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	794.614.000	672.959.807	84,69
2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	107.243.100	88.487.900	82,51
2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.385.431.600	1.046.038.000	75,50
2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.510.900	73.790.600	73,42
2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13.300.000	10.159.800	76,39
2 14 04 2.01 09 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	45.771.900	35.139.800	76,77
2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	64.143.800	54.143.500	84,41
2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	48.642.800	47.717.800	98,10
2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.022.900	6.425.700	80,09

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	7.478.100	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.761.417.088</b>	<b>9.384.924.098</b>	<b>87,21</b>

Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin sampai 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 87,21 % , terdiri dari 4 ( empat ) Program diantaranya : 1) program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.133.806.588,- realisasi Rp. 4.636.068.401,- atau 90,30 % , 2) Program pengendalian Penduduk dengan Pagu anggaran Rp. 336.054.600,- realisasi Rp. 314.479.233,- atau 93,58 % , 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan pagu anggaran Rp. 2.703.601.600,- realisasi Rp. 2.377.397.157,- atau 84,86% dan 4) Program Pembedayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera dengan pagu anggaran Rp. 2.587.954.300,- realisasi Rp. 2.056.979.307,- atau 79,48% .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan memberi manfaat untuk mendorong instansi tersebut dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022.

LKIP Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin merupakan pengukuran dan penilaian kinerja serta memberikan sebuah gambaran transparansi dan akuntabilitas tentang berbagai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi misi melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai urusan wajib bukan pelayanan dasar. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin telah melakukan realisasi belanja pada tahun 2022 dengan penyerapan anggaran kinerja realisasi anggaran sebesar 87,21%. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan kategori Capaian Kinerja di atas 100% atau Baik sekali (BS) sebanyak 1 IKU, kategori Baik sebanyak 2 IKU dan Kategori Cukup sebanyak 1 IKU
2. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 DPPKB Kabupaten Tapin adalah sebesar 92,36 %

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra DPPKB Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan

Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin sampai 31 Desember 2022 mencapai 87,21 % , Dari 4 ( empat ) program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya : 1) program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.133.806.588,- realisasi Rp.





# **LAMPIRAN 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Fax (0517)31510 Kode Pos 71111

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 800/ 012 /DPPKB/2022  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) 2022,  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) tahun 2022, dimaksud pada dictum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**H. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19641012 198305 2 002

**LAMPIRAN I****NOMOR : 800/ 012 /DPPKB/2022****TANGGAL : 03 Januari 2022****PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) TAHUN 2022 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .**

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) TAHUN 2022  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

<b>I. TIM PENGARAH</b>	
Pengarah	: KEPALA DPPKB
Penanggung Jawab	: SEKRETARIS DPPKB
Ketua	: KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPPKB
Sekretaris	: KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Anggota	: 1. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
	2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
	3. KASI. ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
	4. KASI. PENYULUHAN, PENDAYAGUNAAN LINI LAPANGAN DAN KADER KB
	5. KASI. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
	6. KASI. PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ALAT, OBAT, KONTRASEPSI
	7. KASI. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
	8. KASI. PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA
	9. KASI. PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
	10. KASI. BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANJUT USIA
	11. KASI. BINA KETAHANAN REMAJA
Kesekretariatan	: KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**Hj. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19641012 198305 2 002

**LAMPIRAN II**

**NOMOR : 800/ 012 /DPPKB/2022**

**TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2022 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022**

**RENCANA TUGAS  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2022  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

**1. Pengarah, yaitu :**

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2022;
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) tahun 2022;
- c. Menyampaikan laporan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**2. Penanggung Jawab :**

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**3. Ketua**

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip ) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah ( Lkip) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**4. Anggota**

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip) Tahun lalu;
- b. Melakukan analisis Laporan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan telaahan terhadap indikator di perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;



**Hj. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19641012 198305 2 002

# **LAMPIRAN 2**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 97 /DPPKB/2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman



Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 03 Oktober 2016;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 097 /DPPKB/2022  
TANGGAL : 19 Desember 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

No	Kinerja Utama ( Tujuan / Sasaran)	No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan /Cara Perhitungan IKU	Target 2022
1	Meningkatnya Kesertaan Ber - KB	1	Persentase Peningkatan Kesertaan ber - KB ( CPR )	Rumus : ( $\sum$ Peserta KB aktif ) / ( $\sum$ PUS ) * 100% , makna : pasangan usia subur yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi alasan : mengetahui capaian penggunaan alat kontrsepsi KB	83,25%
		2	Persentase Pasangan Usia subur ( PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need )	Rumus : ( $\sum$ PUS IAT + TIAL ) / ( $\sum$ PUS ) * 100 , makna : pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena alasan ingin punya anak ditunda dan tidak ingin anak lagi. alasan : Mengurangi PUS yang tidak ber-KB	9,76%
2	Terkendalnya Angka Kelahiran	1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	Rumus : ( $\sum$ Anak PUS ) / ( $\sum$ PUS ) * 1000 , makna : Jumlah anak yang dimiliki dalam pasagan usia subur . alasan : mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga .	2,15 Anak

No	Kinerja Utama ( Tujuan / Sasaran)	No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan /Cara Perhitungan IKU	Target 2022
3	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	1	Persentase Keluarga Sejahtera	Rumus : ( $\sum$ Jumlah Keluarga Sejahtera / $\sum$ Jumlah keseluruhan Keluarga ) * 100% Alasan : Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut dimensi ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian yang mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak , bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa , memiliki hubungan yang serasi ,selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.	80%



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,

**Hj. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641012 198305 2 002

# **LAMPIRAN 3**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H.M. Arifin Arpan, MM**  
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs.H.M.Arifin Arpan,MM**



Rantau, 31 Desember 2022  
Pihak Pertama,

**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19641012 198305 2 002**

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kab. Tapin

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kesertaan ber – KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB ( CPR )	%	83,25	74,42	74,82		74,87
		Persentase Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi ( Unmet Need)	%	9,76				13,88
2	Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	Anak	2,15				1,96
3	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	%	80				79,60

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.951.879.188
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 214.124.600
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 454.631.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 720.450.300
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 6.341.085.088</b>

Pihak Kedua,

**Drs.H.M.Arifin Arpan,MM**

Rantau, 31 Desember 2022

Pihak Pertama,



**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP.19641012 198305 2 002**



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Sarana dan Prasarana administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100	100	100	100
		Persentase Aset yang tercatat	100%	100	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Pengurusan administrasi perkantoran	100%	100	100	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai LAKIP yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten	78				
4	Meningkatkan Kualitas capaian Kinerja Keuangan	Persentase Penyerapan anggaran SOPD	100%	4,54	18,94	52,15	87,21

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.133.947.143
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.038.500
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.704.545
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.613.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.576.000
<b>JUMLAH</b>		<b>4.951.879.188</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Sekretaris DPPKB,



**Hj. Mastika Murni, SE, MM**  
NIP. 19720205 199303 2 006



**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19641012 198305 2 002



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat

Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan kinerja SOPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	14 Laporan	5	10	11	14
2	Menyusun Perencanaan Administrasi Keuangan SOPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan secara berkala	2 Laporan	1	1	2	2

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.900.000</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Sekretaris DPPKB,

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



**Hj. Mastika Murni, SE, MM**  
NIP. 19720205 199303 2 006



**Mayasari, SE**  
NIP. 19820525 201001 2 023

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat  
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merencanakan dan Mengadakan sarana dan Prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan Prasarana	1 Dok	0	0	0	1 Dok
		Jumlah Aset yang tercatat	1 Dok	0	0	0	1 Dok
2	Menyusun data kepegawaian ,Evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	20 Pegawai	0	0	0	20 Pegawai

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.161.200
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.098.900
3.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200
<b>JUMLAH</b>		<b>34.791.300</b>


Rantau, 31 Desember 2022

Sekretaris DPPKB,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**Hj. Mastika Murni, SE, MM**  
NIP. 19720205 199303 2 006



**KASTALANI, AMKL**  
NIP. 19770430 200701 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	45%	0	0	50%	68%
2	Tersedianya data dan Informasi Keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	25%	50%	75%	100%

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	89.719.200
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.405.400
<b>JUMLAH</b>		<b>214.124.600</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan,



**Sadiyah, S. Sos. M. AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002



**Hi. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19641012 198305 2 002



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan  
Unit Kerja : Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partisipasi mitra kerja /lintas sektor dalam pembinaan kampung KB	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	0	0	75%	100%

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.600
2.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	56.000.100
<b>JUMLAH</b>		<b>70.490.700</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,




**Sadiyah,S.Sos.M.AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002

**Sadiyah,S.Sos.M.AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan  
Unit Kerja : Subkoordinator Penyuluhan Pendayagunaan lini lapangan dan Kader KB  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pembinaan Lini Lapangan, Kader KB dan Sekolah	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK ( org )	25	25	25	25	25
		Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2	0	0	12	12
		Jumlah Kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	185	105	105	240	240

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.582.000
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	17.805.200
<b>JUMLAH</b>		<b>23.387.200</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,



**Sadivem,S.Sos.M.AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002



**Sadivem,S.Sos.M.AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan  
 Unit Kerja : Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan data KKBPK	Jumlah data basis KKBPK yang tersedia ( bh)	60	15	30	45	60
		Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK ( bh)	36	20	20	34	71

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	70.374.700
2.	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.900
3.	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.354.200
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 112.582.800,-</b>

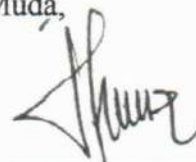
Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,

Jf. Penyuluh Keluarga Berencana  
Muda,



**Sadiyah,S.Sos.M.AP**  
NIP. 19670526 198902 2 002



**ROTUA THERESIA S, S.Sos**  
NIP. 19830708 201402 2 002



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	14,50%	6,5	6,4	5,5	6,44
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total ( TFR) Per WUS ( 15-49 Tahun ) (Rata-rata Anak per Wamita)	2,08	0	0	0	1,96


Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	40.763.100
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	17.640.000
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	320.811.400
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	75.416.500
<b>JUMLAH</b>		<b>454.631.000</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Keluarga Berencana,



**Hj. Abdul Janah, S.Pd, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19641012 198305 2 002

  
**Agus Ari Supriadi, SKM**  
 NIP. 19820808 200501 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana

Unit Kerja : Subkoordinator Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat, Kontrasepsi

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) di setiap lini	Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) yang tersedia ( % )	65%	74,04	51,90	42,11	24,37
		Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokon ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85%	25,95	48,10	57,89	75,63

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000
2.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	17.640.000
<b>JUMLAH</b>		<b>47.640.000</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Keluarga Berencana,

Jf. Penyuluh Keluarga Berencana Muda,

  
**Agus Ari Supriadi, SKM**  
NIP. 19820808 200501 1 005

  
**Pathiah, SKM**  
NIP. 19660303 199103 2 017



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana  
 Unit Kerja : Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang ( Aks )	978 Aks	84	320	414	549
		Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan	4 Aks	3	3	4	4


Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	71.600.200
2.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.085.700
3.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	106.317.600
4.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100
<b>JUMLAH</b>		<b>210.916.600</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Keluarga Berencana,

Jf. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda,

  
**Agus Ari Supriadi, SKM**  
 NIP. 19820808 200501 1 005

  
**Yoyok Timbul Suraryo, SKM**  
 NIP. 19700310 199403 1 008

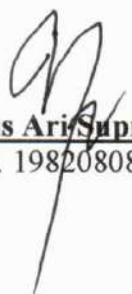
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana  
 Unit Kerja : Subkoordinator Pembinaan Kesertaan KB  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terbinanya Peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	46	72	81	89

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	37.850.000
2.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	82.807.900
3.	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.726.600
4.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900
<b>JUMLAH</b>		<b>196.074.400</b>

Kabid Keluarga Berencana,

  
**Agus Ari Supriadi, SKM**  
 NIP. 19820808 200501 1 005

Rantau, 31 Desember 2022

Jf. Penyuluh Kesehatan  
 Masyarakat Muda,

  
**YUNITA AFRINA, SST**  
 NIP. 19860208 200904 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Partisipasi kelompok Masyarakat dalam pembinaan Keluarga (UPPKS, BKB, BKL, BKR)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	79,52 %	91,23	24,44	4,44	10,64
		Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,56 %	83,87	82,28	91,36	78,79
		Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,14 %	93,57	72,37	72,37	72,37
		Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	84,02 %	76,42	100	100	100
		Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	73,11 %	78,51	73,44	82,35	80

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	683.561.500
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36.888.800
<b>JUMLAH</b>		<b>720.450.300</b>



Kepala DPPKB

**Hj. Ahul Janah, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19641012 198305 2 002

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

**Arief Hardiyanto, S.Sos**  
NIP. 19790511 199803 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TAPIN**

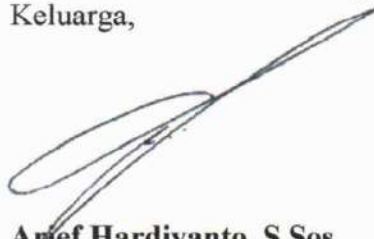
Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
 Unit Kerja : Subkoordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan UPPKS	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS)(kel.)	25	0	0	0	0

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	28.246.900
2.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.387.800
3.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.022.900
4.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	7.478.100
<b>JUMLAH</b>		<b>65.135.700</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,



**Arief Hardiyanto, S.Sos**  
 NIP. 19790511 199803 1 001

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,



**Arief Hardiyanto, S.Sos**  
 NIP. 19790511 199803 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Unit Kerja : Subkoordinator Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan ( BKB dan BKL )	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152	49	89	112	130
		Jumlah BKB, BKL yang mengikuti Lomba	24	0	0	24	24

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	76.939.000
2.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	344.571.600
3.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	13.300.000
<b>JUMLAH</b>		<b>434.810.600</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan  
Keluarga,



**Arjef Hardivanto, S.Sos**  
NIP. 19790511 199803 1 001

Jf. Penyuluh Keluarga Berencana  
Muda,



**Ir. MARIA**  
NIP. 19650512 1995032002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Unit Kerja : Subkoordinator Bina Ketahanan Remaja

Tahun Anggaran : 2022

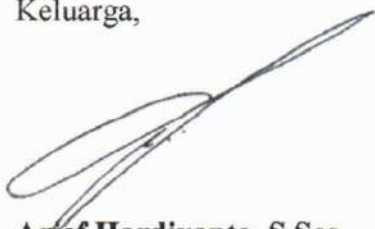
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan ( BKR dan PIK R )	Jumlah lomba Poktan PIK Remaja , Kelompok dan kader BKR	24	0	24	24	24
		Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (kel.)	15	3	3	7	11
		Jumlah PIK Remaja Jalur Masyarakat (Kel.)	25	8	8	16	21

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	119.993.100
2.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.510.900
<b>JUMLAH</b>		<b>220.504.000</b>

Rantau, 31 Desember 2022

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Jf. Penyuluh Keluarga Berencana Muda,



**Arief Hardiyanto, S.Sos**  
NIP. 19790511 199803 1 001



**Jumaitini**  
NIP. 19680510 198903 2 009





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 07 Januari 2023

Nomor : 476/ 005 /DPPKB/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan IV Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 10 Januari 2023  
Pukul` : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin


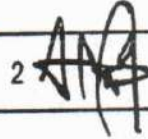


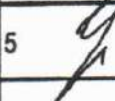
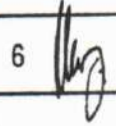
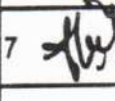

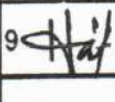
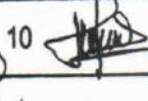
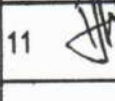
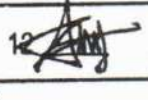
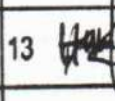
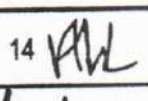
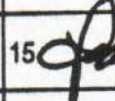
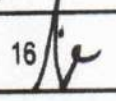
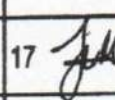
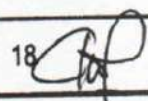

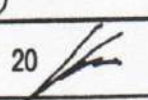
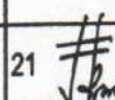
Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.




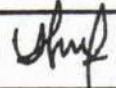
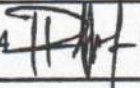

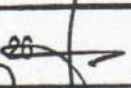
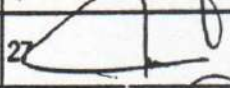
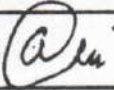
**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002

## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 10 Januari 2023  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AHLUL JANAH	KADIS	1 
2	Mastika Murni	sekretaris	2 
3	Arip H	Kabid K3	3 
4	Sediyem	Kabid Adhuk	4 
5	Ays Ari F	Kabid bb	5 
6	Mayasari	Kabag Perencanaan & keu	6 
7	Kastalari	kabag uupog	7 
8	Yusyk TS	JF. Penyuluh Kesmas	8 
9	Yunita Afrina	JF. PKM	9 
10	Jumai Hini	JF. Penata KKB	10 
11	Pathiah.	JF Penata kepend & KB	11 
12	Muhammad Taufik	Staf	12 
13	Henny Marlina	Staf	13 
14	Nabila NaFisha Putri	staf	14 
15	Najmi Az-zahra B	staf	15 
16	Abdul Hafidz	staf	16 
17	Juwita Sari	Staf	17 
18	mastuti	Staf	18 
19	M. Amin Auali	staf	19 
20	IZWAN NOOR A.	STAF	20 
21	Muhammad Fahrurrazi	Staf	21 



22	Hadjah	STAF	22 
23	Xa Yang Melisha Anifin	STAF	23 
24	Erika Surtizma Dewi	STAF	24 
25	Maria	JF. Penata KMB	25 
26	Noor Efe Cahyani	STAF DPPKB	26 
27	Sai Hul	STAF	27 
28	Anugrah Pramana Putra	STAF	28 

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2023  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan IV Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan indikator Kinerja Individu Triwulan IV diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing Bidang.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan IV banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing Rencana aksi, PK dan IKI.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai sebesar Rp. 9.384.924.098,- sampai dengan 31 Desember 2022 atau sebesar 87,21%.

Rantau, 10 Januari 2023

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 14 Oktober 2022

Nomor : 476/ 267 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan III Tahun 2021**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 17 Oktober 2022  
Pukul` : 13.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.













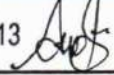
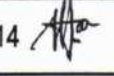
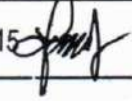
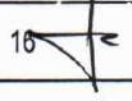
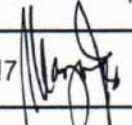
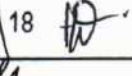
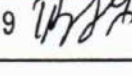
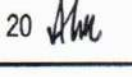



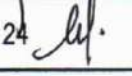

Kepala,  

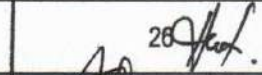

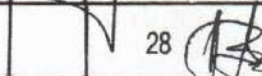
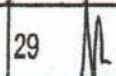
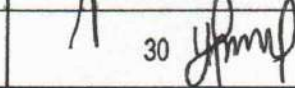
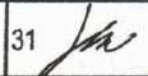
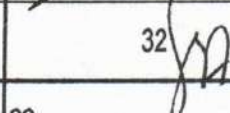

**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



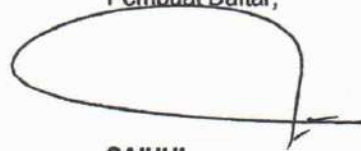
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 17 Oktober 2022  
 JAM : 13.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AALUL JANAH	KADIS	1 
2	Hj. Masrika Murni	Sekretaris	2 
3	Suwiye	Kabid Dukuh	3 
4	Agus As S	Kabid US	4 
5	Arief - A	Kabid KB	5 
6	Juwana Sari	staf	6 
7	Jumai Itri	JF. Penata KCB	7 
8	Kastalani	Kasubag umpeg	8 
9	Raisa	JF. Penata KKO	9 
10	Rathiah.	JF Penata & KB	10 
11	Mastuli	staf	11 
12	Sahul	Pelaksana	12 
13	M. Amin Awali	staf	13 
14	MARVA	JF. Penata KKB	14 
15	Najmi Az-zahra Balela	staf	15 
16	Noor Eka Cahyani	staf	16 
17	Mafasari	Kasubag Rentek	17 
18	Hadigah	staf	18 
19	Rahmatullah Maerudin	Staf	19 
20	Nabila Nafisha Putri	staf	20 
21	Henny Marlina	staf	21 
22	Rohmadi	staf	22 
23	Erisa Sintiana Dewi	staf	23 
24	Citra Sorina Afiant	staf	24 
25	Najma Salsabila S.	Staf	25 

26	yunita Arina	JF - peraka kapal & KB	26 
27	Muhammad Taufik	Staf.	27 
28	M. Rahmat Nispani	Staf	28 
29	Abdul Hafidz	Staf	29 
30	Yayang Meilisha Arifin	Staf	30 
31	IZWAN NOOR H	Staf	31 
32	Yayok	Staf	32 
33			33
34			34
35			35

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022  
Jam : 13.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan III Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan III untuk kinerja yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada laporan Evaluasi terhadap hasil renja dan pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan III sebesar Rp. 5.611.684.124,- atau 52,19%

Rantau, 17 Oktober 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 11 Juli 2022

Nomor : 476/ 133 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan II Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :


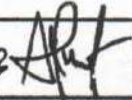
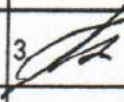


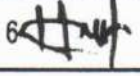




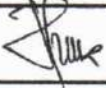
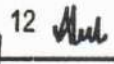
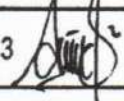
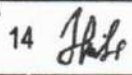
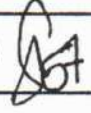
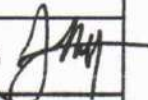


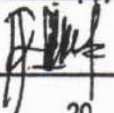
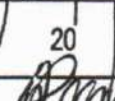
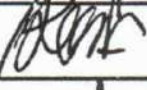



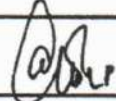
Hari : Selasa, 12 Juli 2022  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002

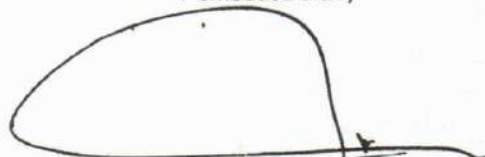
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 12 Juli 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (LP)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. AULUL JARIWA	P	KADIS	1 
2	Hj Mastika Murni	P	Sekretaris	2 
3	ARIEF. H	L	KABID F3	3 
4	Sadyem	P	Kabel Dalbuk	4 
5	Igsr Ai S	L	Kabid KD	5 
6	Xunita Afrina	P	JF PFM	6 
7	Jumaidini	P	JF. Penata KICG	7 
8	Patniah	P	JF Penata KKB	8 
9	MARIA	P	JF. Penata KKB	9 
10	Mutasari	P	Kasubag Penkeu	10 
11	Naisa	P	JF. Penata KKB	11 
12	Nabita Nafisha Putri	P	Staf	12 
13	M. Amin Awali	L	staf	13 
14	Hidayatun Majah	P	staf	14 
15	Yoyok T.S	L	JF. Penyuluh Ker Mas	15 
16	Juwita SARA	P	staf	16 
17	Sachul	L	Pelaksana	17 
18	Henny Marlina	P	Staf	18 
19	Erika Sintiana Dewi	P	Staf	19 
20	Abdul Hafidz	L	staf	20 
21	Rahmazi	L	staf	21 
22	Noor Eka Cahyani	P	staf	22 
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23 
24	Muhammad Taufiq	L	staf	24 
25	Anugrah Pramana Putra	L	Staf	25 

26	Kastalanti	C	Kasdag cunpeg	26	<i>Alal</i>
27	Hadiah	P	Staf	27	<i>Alal</i>
28	Yayang Melisha Arifin	P	Staf	28	<i>Alal</i>
29	IZWAN NOOR IA	L	Staf	29	<i>Alal</i>
30	Gita Sonia Aranti	P	Staf DPKB	30	<i>Alal</i>

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005



## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan II Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan II banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan II sebesar Rp. 2.236.892.746,- atau 20,79%

Rantau, 12 Juli 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 28 Maret 2022

Nomor : 476/ 047 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan I Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : 29 Maret 2022  
Pukul` : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin



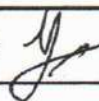

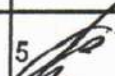




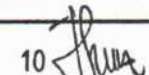

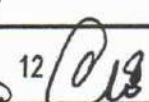



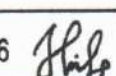

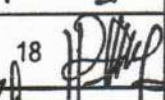
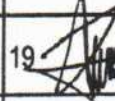
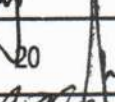

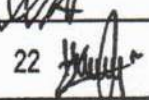
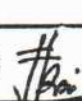

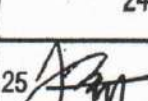
Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 29 Maret 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. ABUL JAMAH	P	KADIS	1 
2	Hj. Masika Murni	P	sekretaris	2 
3	Agus Ari F	L	Kad KB	3 
4	Sahul	L	Platkrana	4 
5	ARIEP. H	L	KABID 1-3	5 
6	Megasari	P	Kasubag Perken	6 
7	Sadyem	P	Kadid Dukduk	7 
8	YOSOK T.S	L	JF. Penyuluh kes Mas	8 
9	Jumaitin	P	JF. Penata KKB	9 
10	Raisa	P.	JF Penata KKB	10 
11	Nabila Nafisha Putri	P	staf	11 
12	Anugrah pramana putra	L	Staf	12 
13	Patricia	P	JF Penata KKB	13 
14	M. Amin Awali	L	staf	14 
15	Gita sonia Aranti	P	staf	15 
16	Hidayatur Najah	P	staf	16 
17	MARIA	P	JF. Penata KKB	17 
18	Erika Sintiana Dewi	P	staf	18 
19	Muhammad Taufik	L	staf	19 
20	Abdul Hafidz	L	staf	20 
21	Agamadi	L	staf	21 
22	Henny Martina	P	staf	22 
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23 
24	Moor Eka Cahyani	P	staf	24 
25	JULIATA SARI	P	staf	25 

26	Xunita Arma	P	JP PFM	26 <i>Handwritten mark</i>
27	Kastalani	L	Kasubag Umpeg	27 <i>Handwritten signature</i>
28				28
29				29
30				30

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005



## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan I Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan I masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi.

Perjanjian Kinerja untuk Esselon II, III dan IV serta Sub Koordinator JF dan Staf, ada beberapa yang belum bisa di ukur capaian kinerjanya.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan I sebesar Rp. 471.171.187,- atau 4,38%

Rantau, 29 Maret 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005



# **LAMPIRAN 4**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**Analisis Keluarga Berencana**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membuat Jadwal kegiatan sebagai pedoman dalam rencana kegiatan	Jumlah Jadwal kegiatan sebagai pedoman dalam rencana kegiatan	12 Dokumen	3	6	9	12
2.	Menganalisis dan menyajikan data mengenai pemakaian kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	Jumlah data mengenai pemakaian kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3	6	9	12
3.	Membantu melaksanakan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	3 Kegiatan	1	2		3
4.	Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam melaksanakan program Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam melaksanakan program Keluarga Berencana	36 Kegiatan	9	18	27	36
5.	Membantu memantau dan menyediakan ketersediaan obat efek samping pelayanan KB	Jumlah kegiatan yang dipantau dan menyediakan ketersediaan obat efek samping pelayanan KB	36 Kegiatan	9	18	27	36
6.	Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	Jumlah bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	3 Kegiatan	1	2	3	
7.	Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap atasan	Jumlah laporan pertanggungjawaban terhadap atasan	12 Laporan	3	6	9	12
8.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan	Jumlah tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan	12 Paket	3	6	9	12

Pihak Kedua

**Jf. Penyuluh Kesehatan Masyarakat  
Muda,**



**Yoyok Timbul Surarvo, SKM**  
NIP.19700310 199403 1 008

Rantau, 31 Desember 2022

Pihak Pertama

**Analisis Keluarga Berencana**



**Juwita Sari, SKM**  
NIP. 19941004 202012 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**Penata keuangan**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Uraian tugas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Membuat SPP untuk diajukan ke PPK	Jumlah Pembuatan Berkas SPP untuk diajukan ke PPK	75 Berkas	6	29	92	164
2.	Membuat Bahan Register Penutupan Kas	Jumlah Pembuatan Berkas Bahan Register Penutupan Kas	6 Berkas	3	6	9	12
3.	Membuat Bendahara Pengeluaran Menyusun Surat Pertanggung jawaban (SPJ)	Jumlah Pembuatan Berkas Bendahara Pengeluaran Menyusun Surat Pertanggung jawaban (SPJ)	650 Berkas	133	621	1.537	4.198
4.	Membantu Bendahara Pengeluaran Melakukan Penginputan SPJ pada Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Pembuatan Berkas Bendahara Pengeluaran Melakukan Penginputan SPJ pada Aplikasi SIMDA Keuangan	500 Berkas	133	621	1.537	4.198
5.	Membantu Register SPP (UP, GU, TU, LS dan Nihil)	Jumlah Dokumen Register SPP (UP, GU, TU, LS dan Nihil)	85 Dokumen	6	29	92	164
6.	Membantu Bendahara Pengeluaran melakukan Penginputan Pajak pada Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Pembuatan Dokumen Bendahara Pengeluaran melakukan Penginputan Pajak pada Aplikasi SIMDA Keuangan	550 Dokumen	11	621	845	1.841
7.	Menyiapkan Bahan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulanan Berikutnya	Jumlah Dokumen Bahan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulanan Berikutnya	1 Dokumen			1	
8.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan	65 Dokumen	20	30	50	65

Pihak Kedua  
**Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,**



**Mayasari,SE**  
 NIP. 19820525 201001 2 023

Rantau, 31 Desember 2022

Pihak Pertama  
**Penata Keuangan,**



**Najmi Az Zahra Balela, S.Ak**  
 NIP. 19960413 202012 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyiapkan dan mengetik Surat Menyurat DPPKB	Jumlah Surat yang disiapkan dan diketik	55 Surat	15	24	41	55
2.	Mengetik Surat Keputusan, Telaahaan Staf	Jumlah Surat Keputusan, Telaahaan Staf	45 Naskah	10	20	25	40
3.	Membuat KIB , KIR dan Buku Inventaris Ruangan	Jumlah KIB , KIR dan Buku Inventaris Ruangan	20 Berkas				20
4.	Input Data Inventaris BMD baru DPPKB	Jumlah Inputan Data Inventaris BMD baru DPPKB	86 Data	20	45	65	86
5.	Membuat Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	6 Berkas		2	2	2
6.	Membuat dan Merekap Barang Persediaan	Jumlah Barang Persediaan	12 Berkas	3	6	9	12
7.	Membuat Stock Opname Barang Persediaan secara berkala	Jumlah Stock Opname Barang Persediaan secara berkala	4 Laporan	1	2	3	4
8.	Menyiapkan berkas permohonan penghapusan barang BMP	Jumlah berkas permohonan penghapusan barang BMP	1 Berkas				1

Pihak Kedua  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian,**



**KASTALANI, AMKL**  
 NIP. 19770430 200701 1 005

Rantau, 31 Desember 2022  
 Pihak Pertama  
**Pengelolaa Pemanfaatan  
 Barang Milik Daerah,**



**SAIHUL**  
 NIP. 19810715 201212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 07 Januari 2023

Nomor : 476/ 005 /DPPKB/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan IV Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 10 Januari 2023  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


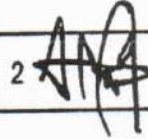


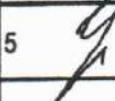
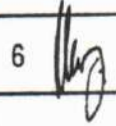
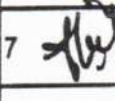

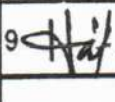
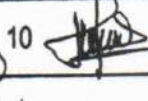
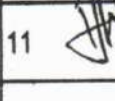
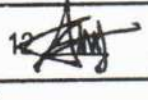
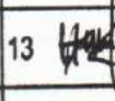
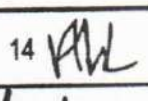
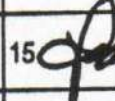
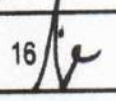
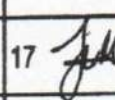
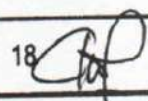

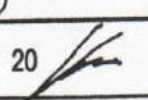
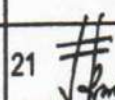


**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002


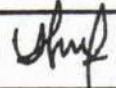
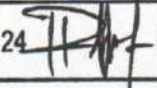

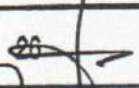
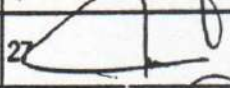
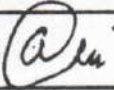


## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 10 Januari 2023  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AHLUL JANAH	KADIS	1 
2	Mastika Murni	sekretaris	2 
3	Ariy H	Kabid K3	3 
4	Sediyem	Kabid Adhuk	4 
5	Ays Ari F	Kabid bb	5 
6	Mayasari	Kabag Perencanaan & keu	6 
7	Kastalari	kabag uupog	7 
8	Yusyk TS	JF. Penyuluh Kesmas	8 
9	Yunita Afrina	JF. PKM	9 
10	Jumai Hini	JF. Penata KKB	10 
11	Pathiah.	JF Penata kepend & KB	11 
12	Muhammad Taufik	Staf	12 
13	Henny Marlina	Staf	13 
14	Nabila NaFisha Putri	staf	14 
15	Najmi Az-zahra B	staf	15 
16	Abdul Hafidz	staf	16 
17	Juwita Sari	Staf	17 
18	mastuti	Staf	18 
19	M. Amin Auali	staf	19 
20	IZWAN NOOR A.	STAF	20 
21	Muhammad Fahrurrazi	Staf	21 



22	Hadjah	STAF	22 
23	Xa Yang Melisha Anifin	STAF	23 
24	Erika Surtizma Dewi	STAF	24 
25	Maria	JF. Penata KMB	25 
26	Noor Efe Cahyani	STAF DPPKB	26 
27	Sai Hul	STAF	27 
28	Anugrah Pramana Putra	STAF	28 

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2023  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan IV Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan indikator Kinerja Individu Triwulan IV diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing Bidang.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan IV banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing Rencana aksi, PK dan IKI.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai sebesar Rp. 9.384.924.098,- sampai dengan 31 Desember 2022 atau sebesar 87,21%.

Rantau, 10 Januari 2023

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 14 Oktober 2022

Nomor : 476/ 267 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan III Tahun 2021**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 17 Oktober 2022  
Pukul` : 13.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.













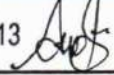

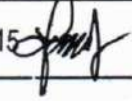
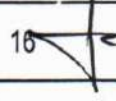
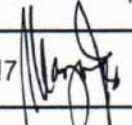
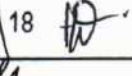
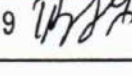
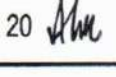



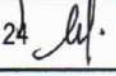

Kepala,  

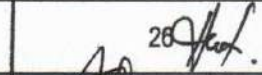

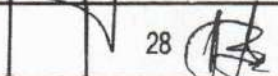
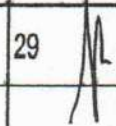
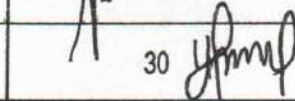
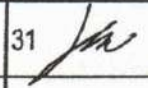
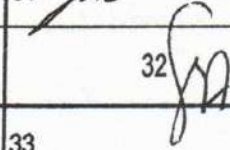

**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



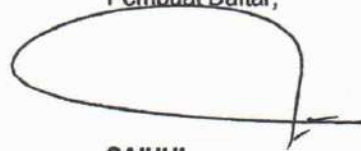
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 17 Oktober 2022  
 JAM : 13.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AALUL JANAH	KADIS	1 
2	Hj. Masrika Murni	Sekretaris	2 
3	Suwiye	Kabid Dukuh	3 
4	Agus As S	Kasid US	4 
5	Arief - A	Kabid KB	5 
6	Juwana Sari	staf	6 
7	Jumai Itri	JF. Penata KCB	7 
8	Kastalani	Kasubag umpeg	8 
9	Raisa	JF. Penata KKO	9 
10	Rathiah.	JF Penata & KB	10 
11	Mastuli	staf	11 
12	Sahul	Pelaksana	12 
13	M. Amin Awali	staf	13 
14	MARVA	JF. Penata KKB	14 
15	Najmi Az-zahra Balela	staf	15 
16	Noor Eka Cahyani	staf	16 
17	Mafasari	Kasubag Renten	17 
18	Hadigah	staf	18 
19	Rahmatullah Maerudin	Staf	19 
20	Nabila Nafisha Putri	staf	20 
21	Henny Marlina	staf	21 
22	Rohmadi	staf	22 
23	Erisa Sintiana Dewi	staf	23 
24	Citra Sorina Afiant	staf	24 
25	Najma Salsabila S.	Staf	25 

26	yunita Arina	JF - peraka kapal & KB	26 
27	Muhammad Taufik	Staf.	27 
28	M. Rahmat Nispani	Staf	28 
29	Abdul Hafidz	Staf	29 
30	Yayang Meilisha Arifin	Staf	30 
31	IZWAN NOOR H	Staf	31 
32	Yayok	Staf	32 
33			33
34			34
35			35

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022  
Jam : 13.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan III Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan III untuk kinerja yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada laporan Evaluasi terhadap hasil renja dan pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan III sebesar Rp. 5.611.684.124,- atau 52,19%

Rantau, 17 Oktober 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 11 Juli 2022

Nomor : 476/ 133 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan II Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :


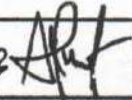
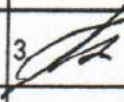


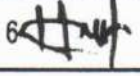




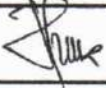
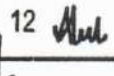
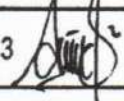
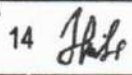

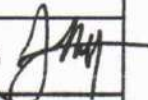
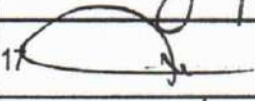


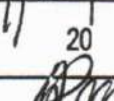
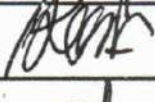
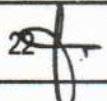
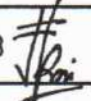

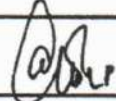
Hari : Selasa, 12 Juli 2022  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002

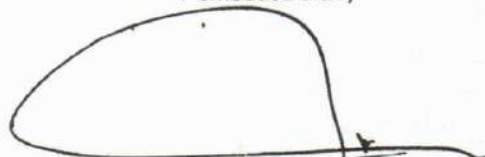
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 12 Juli 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (LP)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. AULUL JARIWA	P	KADIS	1 
2	Hj Mastika Murni	P	Sekretaris	2 
3	ARIEF. H	L	KABID F3	3 
4	Sadyem	P	Kabel Dalbuk	4 
5	Irfan A. S	L	Kabid KD	5 
6	Xunita Afrina	P	JF PFM	6 
7	Jumaidini	P	JF. Penata KICG	7 
8	Patniah	P	JF Penata KKB	8 
9	MARIA	P	JF. Penata KKB	9 
10	Mutasari	P	Kasubag Penkeu	10 
11	Naisa	P	JF. Penata KKB	11 
12	Nabita Nafisha Putri	P	Staf	12 
13	M. Amin Awali	L	staf	13 
14	Hidayatun Majah	P	staf	14 
15	Yoyok T.S	L	JF. Penyuluh Ker Mas	15 
16	Juwita SARA	P	staf	16 
17	Sachul	L	Pelaksana	17 
18	Henny Marlina	P	Staf	18 
19	Erika Sintiana Dewi	P	Staf	19 
20	Abdul Hafidz	L	staf	20 
21	Rahmazi	L	staf	21 
22	Noor Eka Cahyani	P	staf	22 
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23 
24	Muhammad Taufik	L	staf	24 
25	Anugrah Pramana Putra	L	Staf	25 

26	Kastalanni	C	Kasdag cunpeg	26	<i>Alal</i>
27	Hadiah	P	Staf	27	<i>Alal</i>
28	Yayang Melisha Arifin	P	Staf	28	<i>Alal</i>
29	IZWAN NOOR IA	L	Staf	29	<i>Alal</i>
30	Gita Sonia Aranti	P	Staf DPKB	30	<i>Alal</i>

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005



## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan II Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan II banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan II sebesar Rp. 2.236.892.746,- atau 20,79%

Rantau, 12 Juli 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 28 Maret 2022

Nomor : 476/ 047 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan I Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : 29 Maret 2022  
Pukul` : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  


**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 29 Maret 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. ABUL JAMAH	P	KADIS	1
2	Hj. Masika Murni	P	sekretaris	2
3	Agus Ari F	L	Kad KB	3
4	SaihuL	L	Palaksana	4
5	ARIEP. H	L	KABID 1-3	5
6	Megasari	P	Kasubag Perken	6
7	Sadyem	P	Kadid Dukduk	7
8	YOSOK T.S	L	JF. Penyuluh kes Mas	8
9	Jumaitin	P	JF. Penata KKB	9
10	Raisa	P.	JF Penata KKB	10
11	Nabila Nafisha Putri	P	staf	11
12	Anugrah pramana putra	L	Staf	12
13	Patricia	P	JF Penata KKB	13
14	M. Amin Awali	L	staf	14
15	Gita sonia Aranti	P	staf	15
16	Hidayatur Najah	P	staf	16
17	MARIA	P	JF. Penata KKB	17
18	Erika Sintiana Dewi	P	staf	18
19	Muhammad Taufik	L	staf	19
20	Abdul Hafidz	L	staf	20
21	Agamadi	L	staf	21
22	Henny Martina	P	staf	22
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23
24	Moar Eka Cahyani	P	staf	24
25	JULIATA SARI	P	staf	25



26	Xunita Arma	P	JF PFM	26 <i>Handwritten mark</i>
27	Kastalani	L	Kasubag Umpeg	27 <i>Handwritten signature</i>
28				28
29				29
30				30

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan I Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan I masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi.

Perjanjian Kinerja untuk Esselon II, III dan IV serta Sub Koordinator JF dan Staf, ada beberapa yang belum bisa di ukur capaian kinerjanya.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan I sebesar Rp. 471.171.187,- atau 4,38%

Rantau, 29 Maret 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005



# **LAMPIRAN 5**

**MONEV RENCANA AKSI DARI TRIWULAN I S/D IV  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12				13				14
			TW I	TW II	TW III	TW IV								TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,76				13,88	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif MKJP	14,50%	Rp 454.631.000					14,50%	6,50%	6,40%	5,50%	6,44%	Bidang Keluarga Berencana		
	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)	83,25				74,87		Angka Kelahiran Total ( TFR ) Per WJS ( 15-49 Tahun )	2,08					2,08	0	0	0	1,96				
							Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	Rp 40.763.100					70%	0	0	75%	100%			
							Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 bln	Rp 37.850.000	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 bln	Rp 2.913.100	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK (PLKB)	25	Rp 17.640.000				25	25	25	25	25				
							Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12 Bln	Rp 17.640.000	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokasi) yang tersedia	66%					66%	74,04	51,90	42,11	24,37				
								Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi ( Alokasi ) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85%	Rp 320.811.400				85%	25,95	48,10	57,89	75,63				
								Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang	978 Aks					978 Aks	84	320	414	549				
								Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan	4 Aks					4 Aks	3	3	4	4				
							Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Bln	Rp 30.000.000	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Bln	Rp 82.807.900	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	774 Akseptor	Rp 71.600.200	400 Aks	374 Aks			9 Aks	209 Aks	209 Aks	298 Aks				
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Aks	Rp 30.085.700	7 Aks				3 Aks	3 Aks	4 Aks	4 Aks				
							Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	978 Aks	Rp 108.317.800	600 Aks	378 Aks			79 Aks	280 Aks	414 Aks	549 Aks				
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	Rp 75.416.500					85%	46%	72%	81%	89%			
							Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 bln	Rp 36.726.600	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln				



						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	12 bln	Rp	38.889.900	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln	
Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	80			79,6		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	79,52%						79,52%	91,23	24,44	4,44	10,84	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,56%	Rp	720.450.300					92,56%	83,87	82,28	91,36	78,79
							Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,14%							92,14%	93,57	72,37	72,37	72,37
							Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	84,02%							84,02%	76,42	100,00	100	100
							Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	73,11%							73,11%	78,51	73,44	82,35	80
								152							152	49	89	112	130
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	24							24	0	0	24	24
							Jumlah lomba Poktan PIK Remaja , Kelompok dan kader BKR	24	Rp	683.561.500					24	0	24	24	24
							Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (kel.)	15							15	3	3	7	11
							Jumlah PIK Remaja Jalur Masyarakat (Kel.)	25							25	8	8	16	21
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	20 Keg	Rp	70.939.000	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	11 Keg	17 Keg	20 Keg
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Keg	Rp	119.993.100		1 Keg	1 Keg		0 Keg	1 Keg	3 Keg	3 Keg	
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Bln	Rp	344.571.600	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Keg	Rp	100.510.900	1 Keg	2 Keg			0 Keg	1 Keg	3 Keg	3 Keg	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	8 Keg	Rp	13.300.000		2 Keg	2 Keg	2 keg	0 Keg	0 Keg	0 Keg	0 Keg	8 Keg
						Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	2 Keg	Rp	28.248.900	1 Keg	1 Keg			0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS) ( kel.)	25	Rp	36.888.800					25	0	0	0	0
						Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Keg	Rp	21.387.800	1 Keg				0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 07 Januari 2023

Nomor : 476/ 005 /DPPKB/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan IV Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 10 Januari 2023  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.




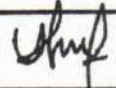
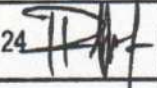
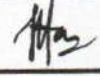
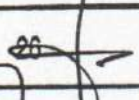
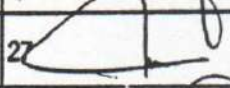

**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 10 Januari 2023  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AHLUL JANAH	KADIS	1
2	Mastika Murni	sekretaris	2
3	Aritz H	Kabid K3	3
4	Sediyem	Kabid Adhuk	4
5	Ays Ari f	Kabid bb	5
6	Mayasari	Kabag Perencanaan & keu	6
7	Kastalani	kabag uupog	7
8	Yusyk TS	JF. Penyuluh Kesmas	8
9	Yunita Afrina	JF. PKM	9
10	Jumai hin	JF. Penata KKB	10
11	Pathiah.	JF Penata kepend & KB	11
12	Muhammad Taufik	Staf	12
13	Henny Marlina	Staf	13
14	Nabila NaFisha Putri	staf	14
15	Najmi Az-zahra B	staf	15
16	Abdul Hafidz	staf	16
17	Juwita sari	Staf	17
18	mastuti	Staf	18
19	M. Amin Auali	Staf	19
20	IZWAN NOOR A.	STAF	20
21	Muhammad Fahrurrazi	Staf	21

22	Hadjah	STAF	22 
23	Xa Yang Melisha Anifin	STAF	23 
24	Erika Surtizna Dewi	STAF	24 
25	Maria	JF. Penata KMB	25 
26	Noor Efe Cahyani	STAF DPPKB	26 
27	Sai Hul	STAF	27 
28	Anugrah Pramana Putra	STAF	28 

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2023  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan IV Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan indikator Kinerja Individu Triwulan IV diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing Bidang.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan IV banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing Rencana aksi, PK dan IKI.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai sebesar Rp. 9.384.924.098,- sampai dengan 31 Desember 2022 atau sebesar 87,21%.

Rantau, 10 Januari 2023

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005









PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 14 Oktober 2022

Nomor : 476/ 267 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan III Tahun 2021**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 17 Oktober 2022  
Pukul` : 13.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin













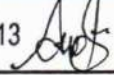

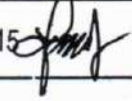
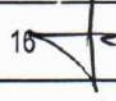
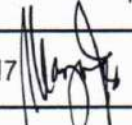
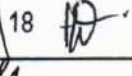
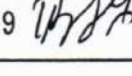
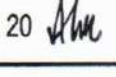



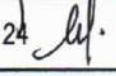

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

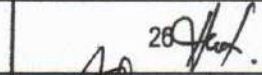

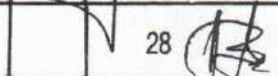
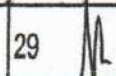
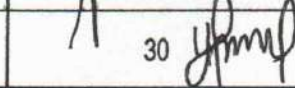
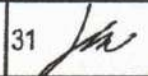
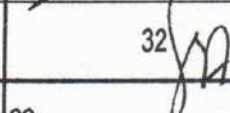
Kepala,  


**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002

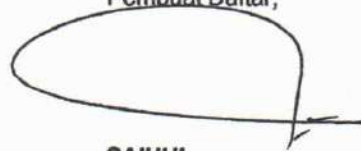
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Senin, 17 Oktober 2022  
 JAM : 13.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. AALUL JANAH	KADIS	1 
2	Hj. Masrika Murni	Sekretaris	2 
3	Suwiye	Kabid Dukuh	3 
4	Agus As S	Kasid US	4 
5	Arief - A	Kabid KB	5 
6	Juwana Sari	Staf	6 
7	Jumai Itri	JF. Penata KCB	7 
8	Kastalani	Kasubag Umpeg	8 
9	Raisa	JF. Penata KKO	9 
10	Rathiah.	JF Penata & KB	10 
11	Mastuli	Staf	11 
12	Sahul	Pelaksana	12 
13	M. Amin Awali	staf	13 
14	MARVA	JF. Penata KKB	14 
15	Najmi Az-zahra Balela	staf	15 
16	Noor Eka Cahyani	Staf	16 
17	Mafasari	Kasubag Rentek	17 
18	Hadigah	staf	18 
19	Rahmatullah Maerudin	Staf	19 
20	Nabila Nafisha Putri	staf	20 
21	Henny Marlina	staf	21 
22	Rohmadi	staf	22 
23	Erisa Sintiana Dewi	staf	23 
24	Citra Sorina Afiant	staf	24 
25	Najma Salsabila S.	Staf	25 

26	yunita Arina	JF - peraka kapal & KB	26 
27	Muhammad Taufik	Staf.	27 
28	M. Rahmat Nispani	Staf	28 
29	Abdul Hafidz	Staf	29 
30	Yayang Meilisha Arifin	Staf	30 
31	IZWAN NOOR H	Staf	31 
32	Yayok	Staf	32 
33			33
34			34
35			35

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022  
Jam : 13.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan III Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan III diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan III untuk kinerja yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada laporan Evaluasi terhadap hasil renja dan pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan III sebesar Rp. 5.611.684.124,- atau 52,19%

Rantau, 17 Oktober 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 11 Juli 2022

Nomor : 476/ 133 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan II Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa, 12 Juli 2022  
Pukul` : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin


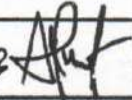
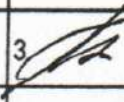


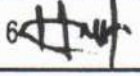




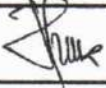
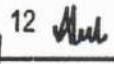
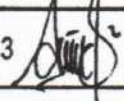
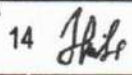

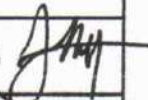



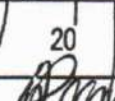
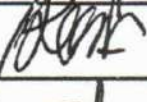

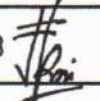

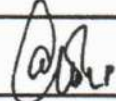
Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
**HJ. AHLUL JANAHAH, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



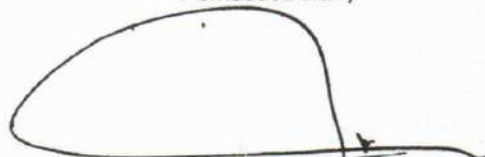
## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 12 Juli 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (LP)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. AULUL JARIWA	P	KADIS	1 
2	Hj Mastika Murni	P	Sekretaris	2 
3	ARIEF. H	L	KABID F3	3 
4	Sadyem	P	Kabel Dalbuk	4 
5	Irfan A. S	L	Kabid KD	5 
6	Xunita Afrina	P	JF PFM	6 
7	Jumaidini	P	JF. Penata KICG	7 
8	Patniah	P	JF Penata KKB	8 
9	MARIA	P	JF. Penata KKB	9 
10	Mutasari	P	Kasubag Penkeu	10 
11	Naisa	P	JF. Penata KKB	11 
12	Nabita Nafisha Putri	P	Staf	12 
13	M. Amin Awali	L	staf	13 
14	Hidayatun Majah	P	staf	14 
15	Yoyok T.S	L	JF. Penyuluh Ker Mas	15 
16	Juwita SARA	P	staf	16 
17	Sachul	L	Pelaksana	17 
18	Henny Marlina	P	Staf	18 
19	Erika Sintiana Dewi	P	Staf	19 
20	Abdul Hafidz	L	staf	20 
21	Rahmazi	L	staf	21 
22	Noor Eka Cahyani	P	staf	22 
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23 
24	Muhammad Taufik	L	staf	24 
25	Anugrah Pramana Putra	L	Staf	25 

26	Kastalanni	C	Kasdag cunpeg	26	<i>Alal</i>
27	Hadiah	P	Staf	27	<i>Alal</i>
28	Yayang Melisha Arifin	P	Staf	28	<i>Alal</i>
29	IZWAN NOOR IA	L	Staf	29	<i>Alal</i>
30	Gita Sonia Aranti	P	Staf DPKB	30	<i>Alal</i>

Pembuat Daftar,



SAIHUL

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev PK dan IKI Triwulan II Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan II diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Untuk capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan II banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan rencana aksi, yang mana capaian tersebut bisa dilihat pada masing-masing realisasi dari target yang dicapai pada Perjanjian Kinerja yang ada pada eselon II, III dan IV beserta Capaian dari Indikator Kinerja Individu pada Staf.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan II sebesar Rp. 2.236.892.746,- atau 20,79%

Rantau, 12 Juli 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

Rantau, 28 Maret 2022

Nomor : 476/ 047 /DPPKB/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Monev Rencana Aksi  
dan Monev IKI Triwulan I Tahun 2022**

Kepada Yth :  
Sekretaris/Kabid/Kasubbid/staf  
DPPKB Kabupaten Tapin  
di-  
Rantau

Sehubungan akan dilaksanakannya Pertemuan Rapat Monev Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kami mengundang Bapak/Ibu untuk berhadir pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : 29 Maret 2022  
Pukul` : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian Surat ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  


**HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19641012 198305 2 002



## ABSEN MAKAN MINUM RAPAT

HARI/TGL : Selasa, 29 Maret 2022  
 JAM : 08.30 s/d Selesai  
 TEMPAT : Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hj. ABUL JAMAH	P	KADIS	1
2	Hj. Masika Murni	P	sekretaris	2
3	Agus Ari F	L	Koad KB	3
4	SaihuL	L	Palaksana	4
5	ARIEP. H	L	KABID 1-3	5
6	Megasari	P	Kasubag Perken	6
7	Sadyem	P	Kadid Dukduk	7
8	YOSOK T.S	L	JF. Penyuluh kes Mas	8
9	Jumaitin	P	JF. Penata KKB	9
10	Raisa	P.	JF Penata KKB	10
11	Nabila Nafisha Putri	P	staf	11
12	Anugrah pramana putra	L	Staf	12
13	Patricia	P	JF Penata KKB	13
14	M. Amin Awali	L	staf	14
15	Gita sonia Aranti	P	staf	15
16	Hidayatur Najah	P	staf	16
17	MARIA	P	JF. Penata KKB	17
18	Erika Sintiana Dewi	P	staf	18
19	Muhammad Taufik	L	staf	19
20	Abdul Hafidz	L	staf	20
21	Agamadi	L	staf	21
22	Henny Martina	P	staf	22
23	Muhammad Fahrurrazi	L	Staf	23
24	Moor Eka Cahyani	P	staf	24
25	JULIATA SARI	P	staf	25



26	Xunita Arma	P	JF PFM	26 <i>Handwritten mark</i>
27	Kastalani	L	Kasubag Umpeg	27 <i>SAIHUL</i>
28				28
29				29
30				30

Pembuat Daftar,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 201212 1 005

## NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Jam : 08.30 wita s/d Selesai  
Tempat Pelaksanaan : Aula DPPKB Kab. Tapin  
Peserta Kegiatan : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag, Staf dan Tenaga Kontrak  
Materi Rapat : Rapat Monev Rencana Aksi, Monev PK dan IKI Triwulan I Tahun 2022

### **Hasil Rapat :**

Rapat Monitoring Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu Triwulan I diadakan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana progress yang sudah dicapai terkait mengenai kegiatan - kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan rencana aksi, PK dan IKI yang telah di buat oleh masing - masing kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian beserta staf.

Capaian Kinerja dari rencana aksi per masing- masing bidang untuk triwulan I masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi.

Perjanjian Kinerja untuk Esselon II, III dan IV serta Sub Koordinator JF dan Staf, ada beberapa yang belum bisa di ukur capaian kinerjanya.

Pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp. 10.761.417.088,- dan tercapai untuk triwulan I sebesar Rp. 471.171.187,- atau 4,38%

Rantau, 29 Maret 2022

Pembuat Laporan,



**SAIHUL**

NIP. 19810715 20121212 1 005

